

WAWASAN KEBANGSAAN DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

**MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II**

**Drs. Idup Suhady, M.Si
Drs. A.M. Sinaga, M.Si**

*Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia
2006*

**Hak Cipta © Pada : Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2006**

**Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201, Fax. (62 21) 3800188**

**Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia**

**Jakarta – LAN – 2006
102 hlm: 15 x 21 cm**

ISBN: 979 – 8619 – 82 – X



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional 2005 – 2009 telah menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah: (1) terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak asasi manusia; serta (3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi ini, mutlak diperlukan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan menjadi PNS. PNS memainkan peran dan tanggungjawabnya yang sangat strategis dalam mendorong dan mempercepat perwujudan visi tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS mengamanatkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Untuk mewujudkan PNS yang memiliki kompetensi sesuai dengan amanat PP 101 Tahun 2000 maka seorang CPNS harus mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi PNS.

Untuk mempercepat upaya meningkatkan kompetensi tersebut, Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah menetapkan kebijakan desentralisasi dengan pengendalian kualitas dengan standar tertentu dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan. Dengan kebijakan ini, jumlah penyelenggaraan dapat lebih menyebar disamping jumlah alumni yang berkualitas dapat meningkat pula. Standarisasi meliputi keseluruhan aspek penyelenggaraan Diklat, mulai dari aspek kurikulum yang meliputi rumusan kompetensi, mata Diklat dan strukturnya, metode dan skenario pembelajaran dan lain-lain sampai pada aspek administrasi seperti persyaratan peserta, administrasi penyelenggaraan, dan sebagainya. Dengan standarisasi ini, maka kualitas penyelenggaraan dan alumni diharapkan dapat lebih terjamin.

Salah satu unsur Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang mengalami penyempurnaan antara lain modul atau bahan ajar untuk para peserta. Oleh karena itu, kami menyambut baik penerbitan modul yang telah disempurnakan ini, sebagai antisipasi dari perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas diberbagai sektor. Dengan kehadiran modul ini, kami mengharapkan agar peserta Diklat dapat memanfaatkannya secara optimal, bahkan dapat menggali keluasan dan kedalaman substansinya bersama melalui diskusi sesama dan antar peserta dengan fasilitator para Widyaiswara dalam proses kegiatan pembelajaran selama Diklat berlangsung.

Kepada penulis dan seluruh anggota Tim yang telah berpartisipasi, kami haturkan terima kasih. Semoga buku hasil perbaikan ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Jakarta, 2006

KEPALA
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

SUNARNO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Pembelajaran.....	2
BAB II KONSEP DAN PENGERTIAN	
TENTANG NEGARA DAN BANGSA	4
A. Teori Mengenai Negara.....	4
B. Bentuk Negara	10
C. Unsur Negara.....	11
D. Pengertian Bangsa	12
E. Rangkuman.....	16
F. Evaluasi	17
BAB III WAWASAN KEBANGSAAN	
DAN INTEGRASI NASIONAL.....	18
A. Pengertian Wawasan Kebangsaan	18
B. Pengertian dan Konsep Integritas Nasional.....	36

BAB IV	NILAI-NILAI KEJUANGAN, <i>CHARACTER BUILDING</i> DAN KETAHANAN BANGSA.....	47
	A. Nilai-nilai Kejuangan.....	47
	B. Nilai dan Prinsip yang Diwariskan	51
	C. Membangun Karakter (<i>Character building</i>).....	55
	D. Ketahanan Bangsa	61
	E. Rangkuman	70
	F. Evaluasi.....	72
BAB V	SOSIAL BUDAYA DAN WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN NASIONAL	73
	A. Pengertian Sosial Budaya	73
	B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Dibidang Sosial Budaya	76
	C. Manfaat Sosial Budaya Sebagai Kekuatan Bangsa.....	84
	D. Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Nasional.....	86
	E. Rangkuman	94
	F. Evaluasi.....	95
REFERENSI	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wawasan kebangsaan sebagai sudut pandang suatu bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya pada dasarnya merupakan penjabaran dari falsafah bangsa itu sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan sejarah yang dialaminya. Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya serta bagaimana bangsa itu memandang diri dan lingkungannya baik ke dalam maupun ke luar.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), makna dan hakikat serta pengejawantahan wawasan kebangsaan tersebut penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengingat kedudukannya sebagai salah satu unsur aparatur negara yang berperan sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk dapat memahami pengertian dan berbagai permasalahan yang menyangkut wawasan kebangsaan maka dalam mata Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) "Wawasan Kebangsaan dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" pada Diklat

Prajabatan Golongan I dan II ini diuraikan dan dibahas antara lain mengenai pengertian dan konsep serta aplikasi wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan dan integrasi nasional, wawasan nusantara, nilai-nilai kejuangan dan membangun karakter serta masalah wawasan kebangsaan melalui kegiatan ceramah, tanya jawab dan diskusi kelompok/kelas.

B. Tujuan Pembelajaran

1. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)

Secara umum setelah mengikuti pembelajaran ini peserta Diklat di harapkan mampu membahas wawasan kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)

Setelah pembelajaran ini, diharapkan peserta mampu:

- a. Menjelaskan pengertian dan konsep negara dan bangsa;
- b. Menjelaskan pengertian wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI;
- c. Menguraikan pengertian dan konsep integrasi nasional;
- d. Menjelaskan nilai-nilai kejuangan;
- e. Menjelaskan pengertian *character building* dan hal-hal yang melemahkan ketahanan bangsa;
- f. Menjelaskan keragaman sosial budaya sebagai kekuatan bangsa;
- g. Menjelaskan wawasan kebangsaan sebagai kekuatan nasional.

Mata Diklat Wawasan Kebangsaan ini antara lain berkaitan dengan mata Diklat Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, Etika Organisasi Pemerintah, dan Budaya Kerja Organisasi Pemerintah dalam hubungan dengan peran PNS sebagai perekat persatuan bangsa dalam pelaksanaan masing-masing tugas/jabatan yang bersangkutan.

Kepada para peserta Diklat disarankan untuk mencermati dan mendiskusikannya dalam proses pembelajaran.

BAB II

KONSEP DAN PENGERTIAN TENTANG NEGARA DAN BANGSA

Bab ini secara garis besar membahas tentang konsep dan teori terjadinya negara, bentuk-bentuk negara dan tujuannya serta pengertian bangsa. Memahami hakikat tentang negara dan bangsa, serta teori mengenai negara secara lengkap ada disiplin tersendiri, yaitu "Ilmu Negara". Namun bab ini konsep dan pengertian tentang bangsa dan negara hanya diketengahkan secara pokok-pokoknya saja sehingga para peserta dapat mengerti dan memahami konsep dimaksud dan penerapannya di Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

A. Teori Mengenai Negara

Secara alamiah, manusia sebagai makhluk sosial sejak dahulu selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya; mencari makan, menanggulangi masalah, mengatasi acaman dan gangguan serta melanjutkan keturunan. Semula kelompok manusia itu hidup berpindah-pindah tempat, kemudian karena perkembangan peradaban, mereka mulai hidup menetap pada suatu tempat tertentu misalnya, untuk berternak dan bercocok tanam.

Dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya pada tempat tinggal tertentu yang dipandang baik untuk sumber penghidupan bagi kelompoknya diperlukan seorang atau

sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan untuk mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok diberikan kekuasaan/kewenangan tertentu dan anggota-anggota kelompok diwajibkan untuk mentaati peraturan atau perintah dari pemimpinnya. Dengan adanya seorang atau beberapa orang dijadikan pemimpin yang mengatur perikehidupan anggota kelompok dan adanya ketaatan dan anggota kelompok terhadap pemimpinnya, maka timbullah dalam kelompok itu suatu kekuasaan "pemerintahan yang sangat sederhana" (Kansil: 1978). Setiap anggota kelompok itu dengan sadar mengetahui dan mendukung tata hidup dan peraturan-peraturan yang ditetapkan pemimpin mereka. Tata dan peraturan hidup tertentu itu mula-mula tidak tertulis yang batasan-batasannya tidak jelas dan merupakan adat kebiasaan saja. Lambat laun peraturan itu mereka tuliskan dan menjadi peraturan-peraturan tertulis yang dilaksanakan dan ditaati.

Dengan makin luasnya kepentingan sekelompok-sekelompok itu dan untuk mengatasi segala kesulitan yang timbul baik internal maupun eksternal, dirasakan perlu dibentuk suatu organisasi yang lebih teratur dan memiliki kekuasaan yang memadai. Organisasi itu sangat diperlukan untuk melaksanakan dan mempertahankan peraturan-peraturan hidup agar dapat berjalan secara tertib. Organisasi yang memiliki kekuasaan seperti itulah yang kemudian dinamakan Negara.

Secara etimologi, istilah "negara" berasal dari terjemahan bahasa asing "Staat" (Belanda, Jerman) dan "State" (Inggris). Kata *Staat* maupun *State* berakar dari bahasa Latin, yaitu *status* atau

statuni, yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri, dan menempatkan. Kata *status* juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang menunjukkan sifat atau keadaan tegak dan tetap.

Dalam hubungan dengan uraian di atas, Kansil (1978) menyatakan bahwa "Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari pada manusia-manusia (masyarakat) dan merupakan alat yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep dan pengertian Negara sebagai organisasi kekuasaan dipelopori oleh J.H.A. Logemaan dalam buku *Over De Theorie Van Een Stelling Staadrecht*, yaitu bahwa keberadaan negara bertujuan untuk mengatur dan menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi. Pengertian tersebut menempatkan negara sebagai organisasi kekuasaan (Budiyanto 1997). Pandangan seperti itu kemudian diikuti oleh Harlod J. Laski, Max Weber dan Leon Duguit. Dalam pengertian luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Di bawah ini dikemukakan pengertian negara dari pendapat beberapa pakar kenegaraan, antara lain:

1. George Jellinek

Negara ialah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

2. George Wilhelm Fredrich Hegel

Negara merupakan organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesa dari kemerdekaan individual dan

kemerdekaan universal.

3. Kranenburg

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

4. Roger F. Soltau

Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.

5. R. Djokosoetono

Negara ialah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama.

6. Soenarko

Negara ialah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dimana kekuasaan negara berlaku sepenuhnya sebagai *souvereign* (kedaulatan).

Dari beberapa pendapat mengenai negara tersebut, dapat disimpulkan pengertian sebagai berikut: "Negara adalah organisasi yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar)".

Dalam konteks organisasi kekuasaan, di dalam negara terdapat suatu mekanisme/tata hubungan kerja yang mengatur suatu kelompok manusia (rakyat) agar berbuat, atau bersikap sesuai dengan kehendak negara.

Untuk menghindari adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, disisi lain negara juga menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan itu dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan, organisasi maupun oleh negara itu sendiri.

Mengenai terjadinya suatu negara terdapat beberapa teori, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara itu adalah soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika telah terpenuhi unsur-unsur negara (daerah, rakyat dan Pemerintah yang berdaulat) maka pada saat itu juga negara sudah menjadi suatu kenyataan.

2. Teori KeTuhanan

Timbulnya suatu negara adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu, tidak akan terjadi apabila Tuhan tidak menghendakinya. Kalimat-kalimat seperti "Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa"*by the grace of God ...*" menunjuk ke arah teori ini.

3. Teori Perjanjian

Negara itu timbul karena perjanjian yang dibuat antara orang-orang yang tadinya hidup bebas merdeka, terlepas satu sama lain tanpa ikatan kenegaraan. Perjanjian ini diadakan agar kepentingan bersama dapat terpelihara dan terjamin, supaya "orang yang satu tidak merupakan binatang buas bagi orang yang lain" (*homo homini lupus* menurut Hobbes). Perjanjian itu disebut perjanjian masyarakat (*Contract Social* menurut ajaran Rousseau). Dapat pula

terjadi suatu perjanjian antara daerah jajahan, misalnya: Kemerdekaan Filipina pada tahun 1946 dan India pada tahun 1947.

4. Teori Penaklukan

Suatu negara timbul karena serombongan manusia menaklukkan daerah dan rombongan manusia lain.

Agar daerah/rombongan itu tetap dapat dikuasai, maka dibentuklah suatu organisasi yang berupa negara.

Selain itu suatu negara dapat pula terjadi karena:

- a. Pemberontakan terhadap negara lain yang menjajah, seperti: Amerika Serikat terhadap Inggris pada tahun 1776 - 1783;
- b. Peleburan (fusi) antara beberapa negara menjadi satu negara baru, misalnya: Jerman bersatu pada tahun 1871;
- c. Suatu daerah yang belum ada rakyatnya/pemerintahannya diduduki/dikuasai oleh bangsa/negara lain, misalnya: Liberia;
- d. Suatu daerah tertentu melepaskan diri dari yang tadinya menguasainya dan menyatakan dirinya sebagai suatu negara baru (misalnya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945).

Hal ini dapat terjadi secara damai (persetujuan dari negara yang tadinya menguasainya), dan dapat juga terjadi secara kekerasan. Cara yang pertama timbul dengan perjanjian dan penyerahan kedaulatan, sedangkan cara yang kedua timbul dengan cara kekerasan (revolusi).

B. Bentuk Negara

Menurut teori-teori modern, bentuk negara yang terpenting ialah Negara Kesatuan (*Unitarisme*) dan Negara Serikat (*Federasi*).

1. **Negara Kesatuan** ialah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dimana di seluruh negara yang berkuasa hanya satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur seluruh wilayahnya melalui pembentukan daerah-daerah dalam wilayah negara. Dalam negara kesatuan pelaksanaan pemerintahan negara dapat dilaksanakan dengan sistem sentralisasi dan desentralisasi.

- a. Sistem sentralisasi, yaitu segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedang daerah-daerah tinggal melaksanakannya.
- b. Sistem desentralisasi, dimana kepada daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.

Bentuk negara kesatuan pada umumnya mempunyai sifat-sifat berikut:

- a. Kedaulatan negara mencakup ke dalam dan ke luar yang ditangani pemerintah pusat.
- b. Negara hanya mempunyai satu Undang-Undang Dasar, satu Kepala Negara, satu Dewan Menteri, dan satu Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Hanya ada satu kebijakan yang menyangkut persoalan politik, ekonomi, moneter/fiskal, sosial budaya, luar negeri serta pertahanan dan keamanan.

2. **Negara Serikat (Federasi)** ialah suatu negara yang merupakan gabungan beberapa negara, yang menjadi negara-negara bagian dan negara serikat itu.

Negara-negara bagian itu semula merupakan suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan diri dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri itu dan kemudian menjadi negara bagian, melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan itu disebutkan satu demi satu (*limitatif*), hanya kekuasaan yang disebutkan itulah yang diserahkan kepada negara serikat (*delegated powers*).

Kekuasaan asli ada pada negara bagian, dan negara bagian itu berhubungan langsung dengan rakyatnya. Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterimanya dari negara bagian.

Biasanya yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan luar negeri, pertahanan negara, keuangan dan urusan pos dan telekomunikasi.

C. Unsur Negara

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa suatu negara itu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) rakyat yang bersatu; (2) daerah atau wilayah; (3) pemerintah yang berdaulat, dan mendapat pengakuan dari negara lain (*Oppenheimer dan Lauterpacht*, dalam Budiyanto 1997).

Konvensi Montevideo pada tahun 1933 menyebutkan unsur-unsur berdirinya suatu negara antara lain berupa rakyat, wilayah yang tetap dari pemerintah yang mampu mengadakan hubungan internasional. Dari pendapat tersebut, unsur rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat merupakan unsur konstitutif karena keberadaannya mutlak harus ada. Sedangkan pengakuan dari negara lain merupakan unsur deklaratif yang bersifat formalitas, karena diperlukan dalam rangka memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional.

Kansil (1978) menyatakan bahwa pada umumnya negara itu harus memenuhi unsur-unsur atau syarat: (a) harus ada wilayahnya; (b) harus ada rakyatnya; (c) harus ada pemerintahannya yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya dan (d) harus ada tujuannya.

D. Pengertian Bangsa

Secara umum bangsa itu merupakan kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara. Dalam arti sosiologis bangsa termasuk "kelompok paguyuban" yang secara kodrat ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenanggungan di dalam suatu negara. Misalnya Negara Republik Indonesia ditakdirkan terdiri atas berbagai suku bangsa.

Dalam Ilmu Tata Negara terdapat berbagai pengertian mengenai istilah bangsa. Mengenai pengertian bangsa berikut ini oleh Budiyanto (1997), dikemukakan pendapat beberapa pakar kenegaraan yang ternama seperti:

1. Ernest Renan (Prancis)

Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat bersatu) dengan perasaan setia kawan yang agung.

2. Otto Bauer (Jerman)

Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai persamaan karakter. Karakteristik tumbuh karena adanya persamaan nasib.

3. F. Ratzel (Jerman)

Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik).

4. Hans Kohn (Jerman)

Bangsa adalah buah hasil hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beranekaragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya bangsa adalah rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama. Caranya ialah dengan mendirikan negara yang akan mengurus terwujudnya aspirasi dan kepentingan bersama secara adil.

Meskipun di kalangan pakar kenegaraan belum terdapat persamaan pengertian bangsa, namun faktor objektif yang

terpenting dari suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama, yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Dalam kehidupan suatu bangsa, kita harus menyadari adanya keanekaragaman yang dilandasi oleh rasa persatuan dan kesatuan tanah air, bahasa, dan cita-cita. Fredrich Hertz dari Jerman dalam bukunya *Nationality in History and Politics* mengemukakan bahwa setiap bangsa mempunyai 4 (empat) unsur aspirasi sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas;
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya;
3. Keinginan dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, keaslian, atau kekhasan. Misalnya, menjunjung tinggi bahasa nasional yang mandiri;
4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise.

Demikian secara singkat uraian dan pembahasan mengenai pengertian dan konsep tentang negara dan bangsa. Kemudian bagaimana dalam penerapannya di Indonesia ditinjau secara ringkas dalam konteks ketatanegaraan kita.

Mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, dapat diketahui bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara (lihat Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUD 1945).

Negara sebagai organisasi kekuasaan melindungi segenap bangsanya yang ada diseluruh wilayah/daerahnya yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bahasa daerah, adat istiadat, agama yang menghuni/bertempat tinggal di seluruh wilayah negara atau tanah air Indonesia yang terdiri dari 13.500 buah pulau besar dan kecil. Indonesia sebagai negara kesatuan pertama kali mendapat pengakuan dari pemerintah Inggris pada tanggal 31 Maret tahun 1947.

Berdasarkan pembahasan konsep negara dan pengertian bangsa sebagaimana telah diuraikan dimuka dapat dikatakan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan yang berbentuk Republik tepatnya adalah negara kebangsaan juga disebut sebagai negara persatuan atau negara kekeluargaan (Bintoro 1996).

Untuk mempertegas hal itu hendaklah disimak kembali pembukaan UUD tahun 1945, yang antara lain disebutkan "supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas"... "membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia".

Dalam hubungannya dengan negara kebangsaan itu, khususnya yang terkait dengan konsep wawasan kebangsaan, penting untuk dikemukakan disini pendapat Bintoro yang mensitir pendapat Moerdiono bahwa "negara kebangsaan bukanlah suatu komunitas sosioantropologis yang tumbuh secara alamiah. Negara kebangsaan adalah suatu komunitas politik yang dirancang, dibangun dan dioperasikan berdasar wawasan kebangsaan. Wawasan Kebangsaan itu sendiri timbul,

berkembang dan beroperasi berdasarkan persetujuan terus menerus dari unsur-unsur komunitas politik itu" (Bintoro, 1966).

E. Rangkuman

Secara konseptual negara terbentuk karena adanya perjanjian atau kesepakatan di antara kelompok-kelompok manusia dalam suatu wilayah atau daerah tertentu untuk mewujudkan kepentingan atau tujuan bersama tanpa membedakan ras/suku, bahasa, agama, adat-istiadat, budaya dan kepentingan politik kelompok yang bersangkutan.

Untuk membentuk negara harus dipenuhi unsur-unsur yang dominan, yaitu rakyat yang bersatu sebagai satu bangsa, daerah atau wilayah yang jelas batas-batasnya, pemerintah yang berdaulat dengan tujuan tertentu dan secara formal mendapat pengakuan dari negara lain dalam rangka memenuhi tata aturan pergaulan internasional.

Menurut teori modern saat ini, bentuk negara yang terpenting ialah negara kesatuan dan negara federasi (serikat). Indonesia sebagai suatu negara termasuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD Negara tahun 1945.

Bangsa pada pokoknya adalah rakyat yang bersepakat untuk bersatu dengan tekad untuk membangun masa depan bersama dengan cara membentuk negara yang akan mengatur dan mengurus kepentingan bersama secara adil.

Bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia yang secara sosiopolitis (komunitas politik) telah mempunyai kesatuan tekad sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat pengakuan internasional, di antaranya mula-mula datang dari Inggris pada tahun 1947 kemudian disusul oleh berpuluh-puluh negara lainnya di dunia.

F. Evaluasi

Jawablah soal-soal latihan dibawah ini secara jelas dan ringkas mengacu pada butir-butir materi yang telah diajarkan.

1. Jelaskan mengenai pengertian negara dan teori terjadinya suatu negara.
2. Ada beberapa negara berdasarkan teori modern dan bagaimana sistem pemerintahan dari masing-masing bentuk negara tersebut?
3. Sebutkan unsur-unsur pokok sebagai syarat terbentuknya suatu negara sesuai dengan pengetahuan anda?
4. Apakah yang dimaksud dengan istilah "bangsa" itu dan jelaskan pula pendapat dari beberapa pakar yang anda ketahui.
5. Bagaimana penerapan teori tentang negara dan bangsa di Indonesia?

BAB III

WAWAWAN KEBANGSAAN DAN INTEGRASI NASIONAL

Bab ini membahas materi pokok sebagai gabungan dari konsep dan pengertian Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pengertian serta konsep Integrasi Nasional. Oleh karena itu secara berturut-turut disajikan mengenai muatan materi yang mengacu pada butir-butir pokok tersebut di atas.

A. Pengertian Wawasan Kebangsaan

1. Pengertian Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Secara etimologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989) istilah wawasan berarti (1) hasil mewawas; tinjauan; pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Dalam kamus tersebut diberikan contoh "Wawasan Nusantara" yaitu wawasan (konsepsi cara pandang) dalam mencapai Tujuan Nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan. Lebih lanjut diberikan pula contoh dalam pengertian lain seperti "Wawasan Sosial", sebagai "kemampuan untuk memahami cara-cara penyesuaian diri atau penempatan diri di lingkungan sosial".

Walaupun dalam rumusan yang berbeda, karena dikaitkan dengan dua subyek yang berbeda yaitu antara "wawasan

nusantara dan wawasan "sosial" sebagaimana diutarakan di atas, namun dapat diambil intisarinya bahwa "wawasan" pada pokoknya mengandung pengertian "kemampuan untuk memahami cara memandang sesuatu konsep tertentu yang direfleksikan dalam perilaku tertentu sesuai dengan konsep atau pokok pikiran yang terkandung di dalamnya".

Selanjutnya mengenai istilah "kebangsaan" yang berasal dari kata "bangsa" dapat mengandung arti "ciri-ciri yang menandai golongan bangsa tertentu", dan dapat pula mengandung arti "kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara" (KKBI, 1989).

Dalam kaitan dengan pengertian yang terakhir ini, (Parangtopo 1993) memberikan pengertian kebangsaan sebagai "tindak tanduk kesadaran dan sikap yang memandang dirinya sebagai suatu kelompok bangsa yang sama dengan keterikatan sosiokultural yang disepakati bersama". Berdasarkan wawasan kebangsaan itu, dinyatakan pula bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu "wawasan yang mementingkan kesepakatan, kesejahteraan, kelemahan, dan keamanan bangsanya sebagai titik tolak dalam berfalsafah, berencana dan bertindak".

Dalam rangka menerapkan konsep wawasan kebangsaan, pada Seminar Pendidikan Wawasan Kebangsaan (1993) dikemukakan perlunya dipahami 2 (dua) aspek sebagai berikut:

a. Aspek Moral

Konsep wawasan Kebangsaan mensyaratkan adanya perjanjian diri atau *commitment* pada seseorang atau

masyarakat untuk turut bekerja bagi kelanjutan eksistensi bangsa dan bagi peningkatan kualitas kehidupan bangsa.

b. Aspek Intelektual

Konsep wawasan Kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai mengenai tantangan tantangan yang dihadapi bangsa baik saat ini maupun di masa mendatang serta berbagai potensi yang dimiliki bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada modul (bahan ajar) Diklat Prajabatan Golongan I dan II ini "Wawasan Kebangsaan" diberikan pengertian sebagai "sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai satu bangsa juga dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya". "Wawasan ini menentukan cara suatu bangsa". Mendayagunakan kondisi geografis negaranya, sejarah, sosiobudaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya.

Wawasan ini juga menentukan bagaimana bangsa itu menempatkan dirinya dalam tata berhubungan dengan sesama bangsanya dan dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia (internasional).

Dalam wawasan kebangsaan terkandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan

peningkatan kualitas kehidupan bangsanya. Selain itu wawasan kebangsaan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan mendatang serta berbagai potensi bangsanya.

2. Wawasan Kebangsaan Indonesia

Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berkembang dan mengkrystal tidak lepas dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam membentuk negara ini. Konsep wawasan kebangsaan Indonesia tercetus pada waktu diikrarkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai tekad perjuangan yang merupakan konvensi nasional tentang pernyataan eksistensi bangsa Indonesia yaitu: satu nusa, satu bangsa dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Wawasan seperti itu pada hakikatnya tidak membedakan asal suku, keturunan, ataupun perbedaan warna kulit. Dengan perkataan lain wawasan tersebut mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa atau yang dapat disebut sebagai wawasan kebangsaan Indonesia.

Dalam hubungan ini Bintoro (1996) mengemukakan bahwa: *Reason d'etre* negara Indonesia bukan berdasar sosio antropologis (etnik), tetapi karena pengalaman sejarah ditindas kolonialisme dan mengaspirasikan kehidupan kebangsaan yang bebas. Wawasan kebangsaan didukung oleh ideologi (gerakan pemikiran) yang timbul di abad ke-18 yaitu Nasionalisme.

Untuk dapat memahami konsep wawasan kebangsaan Indonesia, kiranya perlu disimak berbagai hal yang melatarbelakangi lahirnya konsep tersebut dari telaah dan dokumenter berikut ini.

a. Latar Belakang

Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada abad ke-7 sampai dengan 16, bangsa Indonesia berada dalam periode yang sering disebut sebagai masa "Kerajaan Nusantara". Pada masa itu terdapat 2 (dua) kerajaan besar, yaitu Sriwijaya (abad ke-7 s.d. 12) dan Majapahit (abad ke-13 s.d. 16), yang ternyata telah mampu membawa bangsa Indonesia mencapai puncak kemegahannya sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta berperan penting di kawasan Asia Tenggara. Politik luar negeri Majapahit dikenal dengan "*mitreka satata*" atau dapat disamakan sekarang dengan prinsip bertetangga yang baik (*good neighbour policy*). Juga pada waktu itu dikenal istilah "bhinneka tunggal ika/tan hana dharma mangrua yang artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda). Di sini ditunjukkan betapa kerukunan hidup umat beragama di Indonesia telah berkembang sejak dulu. Karena kedatangan bangsa barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris dan Perancis yang menggunakan tipu muslihat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, maka berakhirilah periode Kerajaan Nusantara itu dan mulailah periode penjajahan yang menindas bangsa

Indonesia dan menghisap kekayaan alamnya, sehingga periode itu merupakan periode penderitaan lahir batin. Sekalipun demikian, sejarah juga membuktikan bahwa menghadapi pengaruh dan tekanan dari luar itu bangsa di nusantara tidak pernah berhenti untuk mengadakan perlawanan.

Semua perlawanan tersebut mengalami kekalahan. Perjuangan yang bersifat lokal senantiasa gagal karena belum adanya persatuan dan kesatuan sedangkan di sisi lain pihak kolonial terus menggunakan politik "*divide et impera*" (pecah belah dan kuasai). Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam mengusir penjajah.

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata.

Pergerakan Budi Oetomo, yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, merupakan tonggak awal sejarah perjuangan yang bersifat nasional. Pergerakan yang dijiwai cita-cita Wahidin Soediro Hoesodo tersebut menandai pula kebangkitan nasional untuk menentang penjajahan secara terorganisasi dan terbuka untuk semua golongan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya, setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Bangsa yang bangkit karena

tekad untuk merdeka, bangsa yang mempunyai harga diri.

Di samping itu bangkit pula gerakan-gerakan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Dalam perjalanan sejarah itu timbul pula gagasan sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan.

b. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

- 1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- 2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- 3) Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
- 4) Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
- 5) Kesetiakawanan Sosial;
- 6) Masyarakat adil makmur.

Dengan demikian wahana kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan Kebangsaan membentuk

manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan, bahwa Wawasan Kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati. Bahkan lebih dari itu Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju, dan mandiri akan berhasil dengan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.

"Cinta akan Tanah Air dan Bangsa" menegaskan nilai sosial dasar. Dengan ini Wawasan Kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi sesamanya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan,

jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat pula berwawasan sempit. Fasisme, Naziisme sebagai nasionalisme yang sempit jelas ditolak oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian esensi nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan/nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan.

Nasionalisme atau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi, karena tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme/Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari sejumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial, yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh

dan dengan lebih mudah.

Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Salah satu ciri khas negara demokratis yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan Kebangsaan Indonesia menegaskan, bahwa demokrasi tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Karena itu dalam demokrasi kita tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat di putuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan berkepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka integrasi nasional terdapat sikap saling hormat menghormati dan bekerjasama antara para pemeluk agama yang berbeda-beda dan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing.

c. Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan Indonesia mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan

dengan itu hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada tanah air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.

Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keanekaan dan kemajemukan. Sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah namun menjadi kekuatan yang memperkaya persatuan.

Wawasan Kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Misi yang diamanatkan ialah agar para warga negara Indonesia membina dengan jiwa besar dengan setia terhadap Tanah Air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta Tanah Air dan Bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antara ras, antar bangsa dan antar negara.

Mencermati makna Wawasan Kebangsaan tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita.

Dengan Wawasan Kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menyelenggarakan misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia.

Untuk dapat memahami hakikat Wawasan Kebangsaan Indonesia perlu kiranya dipahami jati diri bangsa kita

dan untuk itu perlu pula dipahami pandangan dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka dan suka berkoeksistensi dengan bangsa lain. Sudah sejak dulu kala bangsa Indonesia menikmati dan menghayati arti hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain. Dengan letak geostrategik nusantara di posisi silang hubungan antar bangsa, maka wawasan kebangsaan Indonesia tidak hanya bersifat "*inward looking*" dan mengisolasi diri. Laut bagi bangsa Indonesia bukan menjadi pemisah tetapi justru ke luar sebagai wahana dalam berhubungan dengan bangsa lain, sedangkan ke dalam merupakan unsur pemersatu. Wawasan Nusantara yang mengemuka di tengah-tengah silang pendapat antara federalisme dan unitarisme di masa setelah lahirnya Indonesia Serikat, esensinya dapat dikatakan implementasi dari wawasan kebangsaan yang dijiwai semangat bangsa bahari. Dalam wawasan nusantara dinyatakan bahwa wilayah laut adalah bagian dari wilayah negara kepulauan yang kemudian diakui dunia sebagai "*Archipelagic Principle*".

Wawasan Nusantara adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan suatu satu kesatuan dipandang dari segala aspeknya.

Wawasan Nusantara adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahkan segala dorongan dan rangsangan di dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional, yang mencakup:

- 1) Kesatuan Politik, dalam arti:
 - a) Bahwa kedaulatan nasional dengan segala kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa serta merupakan modal dan milik bersama bangsa Indonesia;
 - b) Bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, meyakini dan menganut berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu kesatuan bangsa yang utuh di dalam arti seluas-luasnya;
 - c) Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air serta memiliki suatu tekad bulat dalam mencapai perwujudan cita-cita bangsa;
 - d) Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara, yang dilandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya;
 - e) Bahwa seluruh kepulauan Nusantara

merupakan satu kesatuan wilayah hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.

- 2) Kesatuan Sosial budaya, dalam arti:
 - a) Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu perikehidupan bangsa yang harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat perkembangan masyarakat yang sama, seimbang dan merata serta keselarasan hidup sesuai dengan kemajuan bangsa;
 - b) Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan terdapatnya berbagai corak ragam budaya menggambarkan kekayaan khazanah budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional secara keseluruhan yang dinikmati hasilnya oleh seluruh bangsa.
- 3) Kesatuan Ekonomi, dalam arti:
 - a) Bahwa kekayaan yang terdapat dan terkandung di dalam wilayah nusantara beserta kawasan yuridisnya, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air;
 - b) Bahwa tingkat perkembangan ekonomi harus sesuai dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah dalam pengembangan

kehidupan ekonominya.

- 4) Kesatuan Pertahanan Keamanan, dalam arti:
 - a) Bahwa ancaman terhadap sesuatu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman seluruh bangsa dan negara;
 - b) Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam kerangka menunaikan tanggung jawab masing-masing dalam usaha pembelaan negara.

Realisasi penghayatan dan pengisian Wawasan Nusantara pada satu pihak menjamin keutuhan wilayah nasional dan melindungi sumber-sumber kekayaan alam beserta pengelolaannya, sedangkan pada lain pihak menunjukkan wibawa kedaulatan negara Republik Indonesia.

Kejayaan bangsa Indonesia akan dapat diraih kembali dengan menghidupkan kembali jiwa baharinya berlandaskan wawasan nusantara. Menuju kesama semua pemikir, pemimpin dan perencana serta pelaksana pembangunan Indonesia penerus generasi 45 harus mewujudkan wawasan tersebut dengan dukungan jiwa bahari yang kuat. Artinya pembangunan bukan wilayah darat saja dan di pulau utama saja secara terpisah-pisah, melainkan pembangunan wilayah darat dan laut secara terintegrasi dari Sabang sampai Merauke.

Wawasan Kebangsaan Indonesia adalah wawasan yang terbuka dan bukan wawasan yang dilandasi paham kebangsaan yang sempit. Kemungkinan orang dapat mempertanyakan budaya khas yang dapat menjadi ciri identitas insan Indonesia di atas keragaman budaya daerah yang berkembang subur.

Demikian pula mengenai implementasi kesatuan dan persatuan, perlu menjadi fokus dalam mengembangkan pembangunan masa yang akan datang. Pembangunan industri dan proses industrialisasi di Indonesia misalnya harus menjamin interdependensi perkembangan antar pulau utama yang didukung oleh pembangunan wilayah laut sebagai wahana pemersatu. Hanya dengan bangkitnya kembali jiwa bahari wilayah laut antar pulau dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian kesatuan politik yang kini telah dicapai akan diikuti dengan kesatuan ekonomi hasil pembangunan yang akan datang. Demikian pula kesatuan budaya tidak boleh diabaikan. Desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi daerah mutlak dilakukan. Kebijakan desentralisasi yang dirumuskan berdasarkan wawasan kebangsaan Indonesia, harus mencegah desintegrasi negara kesatuan merongrong wibawa pemerintah pusat dan mencegah timbulnya pertentangan antara pemerintah pusat dengan daerah. Perlu dicegah timbulnya krisis kewibawaan pemerintah pusat.

Intrinsik dalam penegakan kewibawaan tersebut adalah terwujudnya pemerintahan pusat yang bersih dan akuntabel. Daerah harus tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah tanpa mengabaikan terwujudnya kesatuan ekonomi, memperkokoh kesatuan politik dan mengembangkan kesatuan budaya.

Dalam upaya ke arah itu, maka prasyarat sebagai penjamin antara lain adalah warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri kebangsaan (*nation wide oriented*), netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, perkembangan, serta sistem pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan yang berwawasan kebangsaan.

Bangsa Indonesia tidak perlu khawatir bahwa Pancasila akan berbenturan dengan proses globalisasi. Sebab Pancasila sudah mencakup dan menjamin realisasi dari apa yang menjadi tuntutan hak asasi manusia. Pancasila adalah ideologi terbuka yang akan menyerap semua perkembangan sesuai dengan jamannya. Dengan demikian wawasan kebangsaan yang tidak lepas dari induknya yaitu Pancasila tidak akan menjadi penyebab alienisasi bangsa Indonesia dengan eksistensi bangsa lain. Wawasan kebangsaan juga tidak perlu dikhawatirkan menjadi penghambat integrasi ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi pasar. Namun bangsa Indonesia harus waspada dan tanggap mengenai implementasinya di dalam negeri, karena induk dari ekonomi pasar adalah sistem

kapitalisme dan liberalisme yang ditentang oleh aspirasi perjuangan rakyat Indonesia. Keterbukaan dan kebersamaanlah yang menjadi kunci dari keberhasilan, baik Pancasila maupun wawasan kebangsaan dalam membawa bangsa Indonesia ke tujuan nasional yang masih harus terus menerus diperjuangkan.

Dalam pelaksanaannya pembangunan ekonomi pasar Indonesia harus berperan dalam mengembangkan sistem ekonomi pasar internasional yang bermanfaat bagi umat manusia khususnya bangsa yang sedang berkembang dalam rangka mengembangkan tatanan ekonomi dunia baru. Indonesia misalnya secara minimal harus aktif dalam pasar ASEAN dan ASPAC secara maksimal di pasar internasional serta mampu bersaing dengan negara industri maju.

Bangsa Indonesia harus proaktif dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan strategik. Indonesia dengan wawasan kebangsaannya justru harus dapat memberi contoh bagi bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian, dan menghadapi tantangan dari luar tanpa konfrontasi. Indonesia harus dapat meyakinkan bangsa-bangsa lain bahwa eksistensi bangsa bukan merupakan sumber konflik dalam pergaulan umat manusia, namun merupakan aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro, 1993).

B. Pengertian dan Konsep Integritas Nasional

1. Pengertian Integritas Nasional

Untuk dapat menguraikan subyek atau pokok bahasan tersebut di atas, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian dan istilah Integrasi Nasional dari segi bahasa. Istilah Integrasi Nasional terdiri dari dua kata yaitu "Integrasi" dan "Nasional". Istilah "Integrasi" mempunyai arti "pembauran atau penyatuan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat". Sedangkan istilah "Nasional" mengandung pengertian: (1) kebangsaan; (2) bersifat bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa, misalnya cita-cita nasional; tarian nasional, perusahaan nasional (KBBI, 1989). Hal-hal yang menyangkut bangsa itu sendiri dapat juga berupa adat istiadat, suku, warna kulit, keturunan, agama, budaya, wilayah/daerah dan sebagainya.

Mengacu pada penjelasan kedua istilah tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Integritas Nasional adalah identik dengan Integritas bangsa yang mempunyai pengertian "suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial-budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa" (Ibid).

Integritas Nasional sebagai upaya atau proses pembauran berbagai aspek yang menjadi ciri dan atribut bangsa harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa.

- a. Keselarasan adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, aman dan damai sehingga akan timbul ketentraman lahir dan batin. Keselarasan akan terwujud bila setiap orang melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab. Benturan-benturan tidak perlu terjadi, segalanya berlangsung secara wajar dalam perkembangan lingkungan dan masyarakatnya.
- b. Keserasian adalah keadaan yang menggambarkan terpadunya unsur-unsur yang terlibat dalam kehidupan bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat-istiadat, agama, bahasa (daerah) dan sebagainya. Keragaman itu diakui, dihormati, dengan penuh toleransi. Kesemuanya terikat menjadi satu kesatuan dan kekuatan bangsa dalam wadah negara kebangsaan Indonesia.
- c. Keseimbangan adalah keadaan yang menggambarkan bahwa masing-masing unsur yang terlibat dalam hidup bersama dalam hubungan bersama diperlakukan dengan sewajarnya. Masing-masing mendapat perlakuan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, tugas, hak, wewenang dan kewajibannya. Dengan adanya keseimbangan akan tercipta suasana keadilan.

Integritas Nasional sebagai konsep dalam kaitan dengan wawasan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya berlandaskan pada aliran pemikiran atau paham integralistik yang dicetuskan oleh G.W.F. Hegl (1770-1831). Teori ini dikemukakan dalam

hubungan dengan paham idealisme.

Menurut paham tersebut untuk mengenal dan memahami sesuatu harus dicari kaitannya dengan yang lain. Untuk mengenal manusia misalnya, harus dikaitkan dengan masyarakat dimana ia hidup dan untuk mengenal suatu masyarakat harus dicari kaitannya dengan proses sejarahnya. Bagaimana pemikiran atau konsep integritas nasional dalam kerangka negara kesatuan kita?

Berikut ini akan diuraikan tentang konsep Integrasi Nasional dimaksud.

2. Konsep Integrasi Nasional Indonesia

Pemahaman integralistik yang dianut oleh bangsa Indonesia bersumber dari pemikiran Mr. Soepomo yang disampaikan di depan sidang BPUPKI pada tahun 1945. Paham integralistik ini merupakan salah satu aliran dalam teori tentang negara.

Menurut aliran pikiran integralistik ini, negara dibentuk tidak untuk menjamin kepentingan seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai persatuan.

Negara ialah suatu masyarakat yang integral, segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat yang organis. Hal yang terpenting dalam negara yang berdasarkan aliran pikiran integral ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada sesuatu golongan yang paling kuat, atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, akan

tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan pemikiran itu, maka semangat dan struktur kerohanian dari bangsa Indonesia bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti yaitu persatuan antar dunia luar dan dunia batin, antara makrokosmos dan mikrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam suatu masyarakat dan golongan-golongan lain dari masyarakat itu, dan tiap-tiap masyarakat dalam pergaulan hidup di dunia seluruhnya dianggap mempunyai tempat dan kewajiban hidup (dharma) sendiri-sendiri menurut kodrat alam. Segala golongan mahluk, segala sesuatu saling berpengaruh dan kehidupan mereka bersangkutan. Hal itu merupakan idea totaliter, idea integralistik dari bangsa Indonesia, yang terwujud juga dalam susunan tata negaranya yang asli.

Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pimpinannya, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi oleh "semangat gotong royong, dan semangat kekeluargaan". Menurut aliran pikiran tentang negara integralistik yang dianggap sesuai dengan semangat Indonesia asli itu, negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongan politik atau ekonomi yang paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala seseorang, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyat seluruhnya.

Dari uraian Mr. Soepomo di atas dapat dikemukakan bahwa didalam masyarakat yang integralistik, setiap anggota, warga, dan setiap golongan diakui dan dihormati kehadiran dan keberadaannya (eksistensinya), diakui hak dan kewajiban serta fungsinya masing-masing dalam mencapai tujuan bersama. Sebaliknya setiap warga negara, setiap anggota, dan setiap golongan berkewajiban dan bertanggung jawab atas terlindunginya kepentingan, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat seluruhnya. Dengan paham integralistik atau kebersamaan, bangsa Indonesia percaya akan dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin.

Secara rinci ciri-ciri tata nilai integralistik menurut Suprpto (1994) adalah sebagai berikut:

- a. Bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat dan merupakan kesatuan organis;
- b. Eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya secara keseluruhan. Masing-masing anggota, bagian, golongan memiliki tempat dan kewajiban (dharma) sendiri-sendiri merupakan persatuan hidup;
- c. Tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting;
- d. Tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas;
- e. Tidak memberi tempat bagi paham individualisme, liberalisme dan totalitarisme;
- f. Mengutamakan keselamatan maupun kesejahteraan, kebahagiaan bagi seluruh bangsa dan negara;
- g. Mengutamakan penunaian kewajiban daripada

- penuntutan pada hak-hak dan pribadi/golongan;
- h. Mengutamakan upaya memadu pendapat daripada mencari menang sendiri;
- i. Disemangati kerukunan, keutuhan, persatuan, kebersamaan, setia kawan, dan gotong royong;
- j. Saling menolong, membantu, dan bekerjasama;
- k. Berdasarkan kasih sayang, pengorbanan, pria dan wanita, individu dan masyarakat serta lingkungan.

Penerapan nilai keberhasilan dalam kehidupan menuntut pada setiap manusia untuk mengendalikan diri, yakni untuk mengarahkan manusia melakukan pengendalian diri, yakni untuk mengarahkan aktifitas pribadinya menuju terselenggaranya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang demi tercapainya kehidupan bersama yang sejahtera, adil, makmur dan bahagia lahir dan batin. Nilai kebersamaan menuntut kepada tiap individu untuk meletakkan kepentingan dan keinginan pribadi dalam rangka kebersamaan hidup, dan dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini tidak berarti bahwa kepentingan pribadi atau golongan disingkirkan atau ditiadakan. Kepentingan pribadi atau golongan justru merupakan motivasi terbinanya kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan nilai kebersamaan diharapkan tercipta suatu keselarasan dan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, antara wanita dan pria, antara kepentingan individu dan masyarakat dan antara kehidupan duniawi dan kehidupan akhirat.

Nilai-nilai yang merupakan penjabaran tata nilai integralistik ini diterapkan oleh bangsa Indonesia dalam mengatur tata hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dengan bangsanya, dan dengan alam sekitarnya. Nilai-nilai keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebhinnekatunggalikaan, kekeluargaan mewarnai hubungan-hubungan tersebut. Inilah yang kemudian dirumuskan menjadi Pancasila, pandangan hidup bangsa Indonesia, dasar Negara Republik Indonesia dan ideologi bangsa.

Persoalan yang perlu kita pertanyakan adalah setelah kita terima paham negara integralistik Indonesia, kemudian bagaimana implementasinya? Berikut ini disajikan tulisan Moerdiono (1991).

Integrasi Nasional dapat dipahami dari dua segi yaitu (1) Integrasi Nasional secara Vertikal dan (2) Integrasi Nasional secara Horizontal.

Integrasi Nasional secara vertikal membahas bagaimana mempersatukan pemerintah nasional dengan rakyatnya, yang tersebar dalam daerah yang luas.

Oleh karena rakyat itu hidup di bawah kepemimpinan pimpinannya masing-masing, maka Integrasi Nasional secara vertikal ini juga akan berarti mempersatukan pemerintah pusat dengan kepemimpinan di tingkat daerah.

Integrasi Nasional secara horizontal membahas bagaimana mempersatukan rakyat yang majemuk, hidup dalam berbagai golongan primordial yang beranekaragam nilai lembaga serta adat kebiasaannya, sehingga merasa bagian dari satu bangsa yang sama.

Khusus tentang Integrasi Nasional yang vertikal ada 4 (empat) tugas konstitusional yang bersifat abadi dari pemerintah Indonesia, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan akhirnya (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Empat tugas pemerintah yang juga di sebut "tujuan nasional", sekaligus menjadi tolok ukur bagi keberhasilan atau kegagalannya.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sudah barang tentu Presiden tidak bekerja sendiri. Di tingkat pusat, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden, para Menteri serta para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen. Di tingkat daerah Presiden dibantu oleh para Gubernur Kepala Daerah beserta seluruh jajarannya. Di luar negeri Presiden dibantu oleh para duta besar dan para duta. Sekretariat Negara memberikan pelayanan kepada Presiden dari segi Administratif.

Pada tingkat daerah, kelihatannya UUD 1945 mengenal perbedaan antara satuan masyarakat sosiokultural dan satuan masyarakat sosial politik. Perbedaan ini kiranya amat penting untuk kita pahami benar-benar.

Acuan tentang satuan masyarakat sosiokultural ini dapat ditemukan pada pasal 18B dan pasal 32 UUD 1945.

Secara kultural, bangsa kita adalah majemuk dan kemajemukan itu sendiri adalah produk dari sejarah yang

panjang dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itulah, secara sadar kita mengambil sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara.

Kemajemukan ini akan mempunyai relevansi ideologi, politik dan pemerintahan. Ideologi persatuan yang disepakati para pemimpin di tingkat nasional, masih harus dipahami dan didukung oleh masyarakat kita yang tersebar di daerah kepulauan yang luas ini. Sesuai dengan sistem nilai budayanya sendiri. Hal ini adalah wajar saja dan memang demikianlah seharusnya.

Dari sisi politik dan pemerintahan, kita bersama mengetahui bahwa walaupun seluruh peraturan perundang-undangan kita berlaku sama untuk seluruh daerah, namun implementasinya di lapangan akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya ini. Kampanye organisasi kekuatan sosial politik, misalnya jelas perlu bersifat "*tailor made*" untuk daerah-daerah. Kekeliruan dalam memilih tema kampanye, seandainya menyinggung nilai-nilai dasar yang dianut masyarakat daerah tersebut, akan berarti hilangnya dukungan pemilih.

Sudah barang tentu dalam setiap masyarakat sosial budaya tersebut juga akan terjadi dinamika dan perubahan, disamping adanya kesinambungan. Perubahan dan kesinambungan itu harus dikaji secara sungguh-sungguh, agar kebijakan yang akan kita ambil mendapat dukungan masyarakat di lapangan. Hal itu bisa dilakukan dengan dimulai apa yang disebut sebagai studi kewilayahan ("*regional studies*"). Pemerintah Hindia Belanda dahulu menamakan sebagai indologi.

Gagasan satuan masyarakat sosial politik ditemukan dalam pasal 18 UUD 1945 sebagai berikut:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan UU.
- b. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- c. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- d. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- e. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- f. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- g. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Dengan demikian, satuan masyarakat sosial politik ini merupakan masyarakat hukum, dibentuk dengan Undang-Undang, merupakan bagian dari sistem pemerintahan

nasional.

Secara ideologis dan secara konstitusional, masalah sistem pemerintahan di tingkat daerah yang kita hadapi adalah bagaimana menyusun tatanan pemerintahan yang bisa memberi peran fungsional terpadu baik pada satuan masyarakat sosiokultural yang bersifat asli ini maupun pada satuan masyarakat sosiopolitik yang dirancang secara nasional.

Hal itu bisa dilakukan dengan memberi peluang untuk mengadakan penyesuaian secara lokal pada ketentuan-ketentuan hukum yang secara nasional dibuat dalam garis-garis besar saja. Beberapa daerah bahkan sudah menemukan wujudnya yang operasional, seperti gerakan "Manunggal Sakato" yang dikembangkan di daerah Sumatera Barat.

Cara berpikir seperti ini juga sudah mulai diperkenalkan dalam pendidikan, dengan memberi peluang untuk adanya muatan lokal dalam kurikulum, yang bersifat komplementer dan suplemen dengan kurikulum yang bersifat nasional.

BAB IV NILAI-NILAI KEJUANGAN, CHARACTER BUILDING DAN KETAHANAN BANGSA

Sesuai dengan judul bab ini, maka dalam uraian pembahasan, sistematika penyajiannya tersusun atas uraian tentang nilai-nilai kejuangan; daya saing nasional, pengertian *Character Building* dan hal-hal yang melemahkan ketahanan bangsa.

Kesemua uraian dan pembahasan materi pokok bahasan dikaitkan dengan konteks wawasan kebangsaan kita.

A. Nilai-Nilai Kejuangan

Dari segi semantik nilai-nilai kejuangan terdiri dari dua istilah yaitu "Nilai" dan "Kejuangan". "Nilai" adalah konsep yang berkenaan dengan sesuatu, sedangkan "juang" sebagai kata kerja berarti "laga, lawan, kelahi, perang memperebutkan sesuatu dengan mengadu tenaga". Berjuang adalah berlaga, berkelahi, berperang dan berlawanan (KBBI, 1989).

Dengan demikian nilai kejuangan adalah konsep yang berkenaan dengan sifat, mutu, keadaan tertentu yang berguna bagi manusia dan kemanusiaan yang menyangkut perihal perang, kelahi, lawan dan laga. Kata nilai kejuangan dikenal terhadap konsepsi abstrak, anutan, paham dan pendorong yang menyebabkan orang

dapat berperang, berkelahi, berlawan dan berlaga, sehingga bermanfaat bagi dirinya untuk menang.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya dorong perlawanan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka. Nilai kejuangan diletakkan pada upaya selama bergenerasi-generasi untuk mencapai kemerdekaan. Nilai kejuangan seperti ini dimiliki oleh generasi pra 45 dan generasi 45. Sebutan generasi 1945 sangat mengemuka karena pada tahun 1945 inilah keberhasilan kemerdekaan bangsa itu datang. Namun, tentu saja keberhasilan itu bukan dibuat oleh generasi 45 belaka. Nilai perjuangan ini mewaris terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Oleh karena itu, generasi pra 1945 yang mewakili seluruh sifat, kadar, mutu konsepsi yang menggerakkan perlagaan, perlawanan, dan peperangan yang diperoleh dari generasi sebelumnya, kemudian berkulminasi pada saat menjelang memasuki generasi 45. Jadi generasi 45 mewarisi seluruh sifat dan mutu baik itu dari generasi pra 45 yang menghasilkan kemerdekaan.

Sekarang generasi 45, mulai berkurang, nilai kejuangan perlu diwariskan hingga proses perkembangan dan pembangunan bangsa ini berlangsung dengan lancar.

1. Hakikat Mempelajari Perjuangan Bangsa

Hakikat mempelajari dan menghayati sejarah perjuangan bangsa adalah upaya membangkitkan kesadaran Nasional yang mengandung arti:

Peristiwa Nasional di masa lampau; Situasi Nasional di masa kini; Aspirasi Nasional di masa mendatang.

Kemampuan pandang tiga dimensi harus dimiliki sehingga perjuangan bangsa Indonesia membimbing kita dan dijadikan sebagai edukasi dan inspirasi bagi perjuangan selanjutnya.

Pada peristiwa nasional di masa lampau: dari aspek politik, berkat perjuangan bangsa telah mampu bernegara di tingkat Nasional yaitu negara Sriwijaya dan Majapahit.

Dari aspek sosial ekonomi kita pernah mencapai martabat bangsa yang penuh ketenteraman, kesejahteraan, kemakmuran sebagai *gemah ripah loh jinawi, tata tentrem karta raharja*, mampu membuktikan dalam pertanian, perdagangan, pelayanan dan sebagainya.

Dari aspek rohani kita telah menerapkan prinsip-prinsip toleransi hidup beragama misalnya antara agama Hindu, Budha, Islam dan Nasrani.

Dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa Barat di Indonesia kehidupan bangsa menjadi terpecah belah. Kita kehilangan kemerdekaan, baik bidang politik, ekonomi maupun sendi-sendi kemasyarakatan yang berakibat menderita lahir dan batin.

Akibat penindasan dalam berbagai bentuk, rakyat pada awalnya mengadakan "Perang Lokal" baik langsung maupun tidak langsung.

Berkat pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah dan mengemban amanat penderitaan rakyat akhirnya mampu melandasi timbulnya semangat untuk menjadi bangsa yang bersatu, mempunyai semangat pengabdian, pengorbanan, sikap perkasa, gagah berani, rela berkorban karena ada kesadaran dan rasa tanggung jawab membela kebenaran, keadilan dan kejujuran demi kebaktian terhadap nusa dan bangsa yang tercinta.

2. Jiwa dan Makna Dalam Perjuangan

Jiwa perjuangan bangsa merupakan penerus perjuangan yang didahului dengan menghancurkan seluruh kekuatan imperialisme dan kolonialisme. Di persada Nusantara berupa sifat mental yang mengandung moral nasional yang luhur yaitu:

- a. Jiwa merdeka, yaitu jiwa yang sadar akan kemampuan sendiri tanpa ketergantungan pada negara lain dan memiliki martabat yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain;
- b. Jiwa persatuan dan kesatuan, yaitu sadar akan pentingnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Jiwa konsekuen tanpa pamrih dan sederhana, yaitu sadar untuk membina prinsip-prinsip, berani berkorban serta wajar dan jujur dalam bertindak;
- d. Jiwa kokoh yang tak kenal menyerah, sadar membela

- e. Jiwa propatria, yaitu mempunyai rasa cinta yang besar terhadap tanah air;
- f. Jiwa kepeloporan dan kepemimpinan yaitu ikut aktif dalam berjuang dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa;
- g. Jiwa keikhlasan berjuang, yaitu ikhlas dalam membela kepentingan nasional.

B. Nilai dan Prinsip yang Diwariskan

1. Umum

Walaupun lingkungan masyarakat Indonesia sejak tahun 1945 telah mengalami kemajuan dan perkembangan seperti dalam bidang penerapan teknologi modern dan pedekatan-pendekatan dalam pembangunan lain yang lebih disempurnakan, akan tetapi sistem nilai-nilai yang melandasi pembangunan masyarakat Indonesia sebagaimana yang diungkapkan dalam Pancasila dan UUD tahun 1945 tidak berubah dan tidak akan berubah.

Pancasila sebagai falsafah hidup, dasar negara, pandangan hidup dan pedoman hidup bangsa menuntut seluruh warga negara untuk berpola pada Pancasila mulai dari cara berpikir, sikap mental maupun tingkah laku mencerminkan implementasi dan nilai-nilai luhur Pancasila. Kepatuhan dan ketaatan setiap warga negara, lembaga negara, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan politik terhadap Pancasila tidak cukup hanya batin saja tetapi perlu penghayatan dan pengamalannya.

2. Nilai dan Prinsip

Secara rinci nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan dan telah mendapat kesepakatan seluruh rakyat adalah:

a. Nilai-nilai 1945

- 1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai penjelma falsafah dan pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945.
- 2) Lima sila dalam Pancasila yang masing-masing merupakan nilai-nilai intrinsik yang abstrak umum universal tetap tak berubah, terlepas dari perubahan dan perkembangan jaman dan kelima-limanya merupakan kesatuan bulat dengan susunan yang *hierarchis pyramidal*.
- 3) Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - a) Negara Kesatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia. Negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan.
 - b) Tujuan negara, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial.
 - c) Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas

Kerakyatan dan Permusyawaratan Perwakilan.

- d) Negara berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- e) Negara yang merdeka dan berdaulat.
- f) Anti penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan Peri Kemanusiaan dan Peri Keadilan.

b. Prinsip-prinsip penjelmaan Pancasila yang telah mendapatkan kesepakatan seluruh rakyat

- 1) Prinsip-prinsip yang tercantum dalam UUD 1945:
 - a) Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik (Pasal 1 ayat (1)).
 - b) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan pangkal ide kesetaraan antara individu dan masyarakat yang bersumber pada sifat kodrat individu makhluk sosial sebagai kesatuan dwitunggal (Pasal 28 A).
 - c) Sistem sosial budaya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika.
 - d) Sistem politik atas dasar kesamaan kedudukan semua Warga Negara dalam Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
 - e) Sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan (Pasal 33 ayat 1).
 - f) Sistem pembelaan negara berdasarkan hak dan kewajiban bagi semua Warga Negara (Pasal 30 ayat 1).

- g) Sistem pemerintahan Demokrasi berdasarkan sendi-sendi:
 - ✓ Negara Hukum (Pasal 1 ayat 3);
 - ✓ Kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat 2).
 - h) Pemerintahan yang bertanggung jawab pada rakyat.
 - i) Pemerintahan Presidensial: Presiden adalah Kepala Pemerintahan (Pasal 4 ayat 1).
 - j) Pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
 - k) Kekuasaan Kehakiman yang bebas.
 - l) Otonomi Daerah (Pasal 18).
- 2) Prinsip-prinsip yang lahir dari perjuangan mencapai, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan:
- a) Rasa senasib sepenanggungan dan rasa persatuan yang kuat;
 - b) Mempertahankan dan mengembangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang berakar pada sejarah dan kebudayaan Bangsa;
 - c) Mengambil segi-segi positif dari kebudayaan bangsa lain yang bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara;
 - d) Tridarma:
 - ✓ Merasa ikut memiliki sesuatu yang menjadi milik umum atau kepentingan umum, milik dan kepentingan bangsa dan negara;
 - ✓ Bertanggung jawab untuk mempertahankan milik bersama atau kepentingan umum;

- ✓ Berani berterus terang mawas diri sampai kemana kita telah berbuat untuk mempertahankan milik atau kepentingan bersama tersebut, termasuk di dalamnya nilai-nilai 45 yang menjadi milik kepentingan bersama seluruh Bangsa Indonesia,
- e) Rasa kekeluargaan dan prinsip hidup gotong royong.

Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diwariskan tersebut secara terus menerus ditegakkan, ditaati agar ketaatan yang berlaku membudaya sekaligus sebagai kewajiban akan menjadi norma. Norma inilah yang harus selalu dilestarikan dari generasi ke generasi.

Tanpa adanya kehendak dan keikhlasan menggali dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan bangsa akan membawa generasi penerus kehilangan arah dan pedoman dalam upaya mempertahankan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 atau nilai-nilai kejuangan bangsa.

C. Membangun Karakter (*Character Building*)

Keberhasilan suatu bangsa dalam mencapai tujuannya, tidak hanya ditentukan oleh dimilikinya sumber daya alam yang melimpah ruah, akan tetapi sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa "Bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas/karakter bangsa

(manusia) itu sendiri". Dilihat dari segi manajemen suatu organisasi, maka unsur manusia merupakan unsur yang paling utama dibandingkan dengan unsur-unsur lainnya seperti: uang (*money*), metode kerja (*method*), mesin (*machine*), perlengkapan (*material*) dan pasar (*market*), dikatakan demikian, karena tidak dapat dipungkiri bahwa adanya dayaguna, manfaat, dan peran unsur-unsur tersebut, hanya dimungkinkan apabila unsur "manusia" mempunyai, memiliki daya/kekuatan untuk memberdayakan berbagai unsur dimaksud sehingga masing-masing unsur dapat memberi hasil, manfaat, dayaguna dan peran dalam manajemen tersebut.

Demikian juga halnya kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Sangat tergantung pada kesempurnaan Aparatur Negara dan kesempurnaan Aparatur Negara pada pokoknya tergantung dari kesempurnaan Pegawai Negeri. Dalam hubungan ini diperlukan Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Negara dan pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berhasilguna, bersih, profesionalisme dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Apabila dilihat dari peran Pegawai Negeri sebagai Aparatur Negara, pelayan masyarakat, maka tidak bisa tidak karakter (*character*) Pegawai Negeri mutlak dibangun sehingga memiliki perilaku yang kondusif dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Dengan demikian Pegawai Negeri dapat memainkan perannya sebagai perekat persatuan dan kesatuan

dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1. Pengertian Membangun Karakter (*Character Building*)

Dari segi bahasa, Membangun Karakter (*Character Building*) yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu: Membangun (*to build*) dan Karakter (*Character*). Adapun arti "Membangun" bersifat memperbaiki, membina, mendirikan, mengadakan sesuatu. Sedangkan "Karakter" adalah tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dalam konteks bahan ajar ini pengertian "Membangun Karakter" (*Character Building*) adalah suatu proses atau usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, akhlak (budi pekerti), insan manusia (masyarakat) sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa upaya membangun karakter akan menggambarkan hal-hal pokok sebagai berikut:

- a. Merupakan suatu proses yang terus menerus di lakukan untuk membentuk, tabiat, watak dan sifat-sifat kejiwaan yang berlandaskan kepada semangat pengabdian dan kebersamaan;
- b. Menyempurnakan karakter yang ada untuk terwujudnya karakter yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- c. Membina karakter yang ada sehingga menampilkan

karakter yang kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai falsafah bangsa yakni Pancasila.

Membangun karakter bangsa pada hakikatnya adalah agar sesuatu bangsa atau masyarakat itu memiliki karakter sebagai berikut:

- a. Adanya saling menghormati dan saling menghargai diantara sesama;
- b. Adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong;
- c. Adanya rasa persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
- d. Adanya rasa peduli dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Adanya moral, akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama;
- f. Adanya perilaku dan sifat-sifat kejiwaan yang saling menghormati dan saling menguntungkan;
- g. Adanya kelakuan dan tingkah laku yang senantiasa menggambarkan nilai-nilai agama, nilai-nilai hukum dan nilai-nilai budaya;
- h. Sikap dan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka sifat karakter suatu bangsa/masyarakat pada dasarnya dapat dikenali pada dua sifat, yaitu:

- a. Karakter yang bersifat positif, yakni suatu tabiat, watak yang menunjukkan nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Karakter yang bersifat negatif, yakni tabiat, watak yang

menunjukkan nilai-nilai negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Faktor-Faktor Membangun Karakter

Karakter sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan berorganisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta/usaha dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa karakter manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan kunci yang sangat penting untuk mewujudkan cita-cita perjuangan guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur berlandaskan Pancasila.

Dikatakan penting karena karakter mempunyai makna atau nilai yang sangat mendasar untuk mempengaruhi segenap pikiran, tindakan dan perbuatan setiap insan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Nilai yang dimaksud adalah antara lain:

- a. Kejuangan;
- b. Semangat;
- c. Kebersamaan Atau Gotong Royong;
- d. Kepedulian Atau Solider;
- e. Sopan Santun;
- f. Persatuan dan Kesatuan;
- g. Kekeluargaan;
- h. Tanggung Jawab.

Nilai-nilai seperti tersebut di atas tampaknya cenderung semakin luntur dalam kehidupan berbangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dapat dilihat secara jelas misalnya dengan adanya "Kasus Maluku", yaitu terjadinya konflik horizontal antar etnik dan antar agama yang mencerminkan ketidakkukuhan nilai-nilai kebangsaan. Seandainya kekukuhan nilai senantiasa terwujud dalam kehidupan setiap insan manusia Indonesia, maka konflik yang banyak merenggut korban itu, tentu akan tidak terjadi. Demikian juga halnya "Kasus Kalimantan" (Pontianak dan Palangkaraya), yakni adanya konflik antar etnis yang juga memakan banyak korban harta maupun jiwa. Disamping konflik agama dan etnik tersebut, juga ditemukan konflik politik yang bersifat regional (daerah), yakni adanya suatu kelompok kekuatan politik di daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang ditandai dengan adanya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu di Papua juga terjadi hal serupa yang ditandai dengan adanya gerakan secara terorganisir dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Kemudian ironisnya lagi maraknya perkelahian antar pelajar (tawuran), bahkan mahasiswa yang juga tidak sedikit merenggut nyawa diantara sesama mereka dan sudah merembes terhadap kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Wawasan kebangsaan nampaknya sudah tidak menjiwai watak masyarakat kita yang selama ini disebut sebagai masyarakat yang penuh toleransi, saling menghormati di dalam kemajemukan masing-masing dan hidup secara bergotong royong.

Mengingat karakter suatu masyarakat, bangsa dan negara mempunyai nilai dan makna yang sangat strategis, maka faktor-faktor yang perlu dan senantiasa diperhatikan antara lain:

- a. Ideologi;
- b. Politik;
- c. Ekonomi;
- d. Sosial Budaya;
- e. Agama;
- f. Normatif (hukum dan peraturan perundangan);
- g. Pendidikan;
- h. Lingkungan;
- i. Kepemimpinan

D. Ketahanan Bangsa

1. Umum

Kita semua menyadari bahwa setiap bangsa mempunyai cita-cita luhur dan indah yang ingin dicapai oleh suatu bangsa yang mempunyai fungsi sebagai penentu dari tujuan nasionalnya. Lazimnya dalam usaha mencapai tujuan nasional tersebut, bangsa yang bersangkutan menghadapi tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang senantiasa perlu dihadapi ataupun ditanggulangi. Oleh karena itu, suatu bangsa harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan. Umumnya hal inilah yang dinamakan Ketahanan Nasional, yang dapat juga disebut sebagai ketahanan bangsa. Oleh karena itu Ketahanan

Nasional harus senantiasa dibina terus menerus sepanjang masa untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Ketahanan Nasional senantiasa perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Dengan perkataan lain, makin tinggi tingkat Ketahanan Nasional suatu bangsa, makin kuatlah posisi bangsa tersebut, baik keluar maupun ke dalam.

Mengingat bahwa konsepsi Ketahanan Nasional itu masih sangat muda usianya, maka wajarlah jika isi pengertiannya belum begitu jelas bagi sementara kalangan. Untuk menjelaskannya digunakan sarana dengan meneliti arti dari istilah Ketahanan Nasional dan yang merupakan komponen-komponennya. Ketahanan berasal dari asal kata tahan yang berarti: tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai dirinya, tidak kenal menyerah.

Dari kata tahan itu terbentuk kata Ketahanan Nasional yang berarti: perihal (kuat), keteguhan hati, ketabahan.

Jadi yang dimaksud dengan Ketahanan Nasional adalah: Perihal tahan (kuat) keteguhan hati, ketabahan dalam rangka kesadaran. Dalam pengertian nasional (Bangsa yang telah menegara) tersimpul paham bahwa produk dari suatu wilayah tertentu yang telah mempunyai pemerintahan nasional dan berdaulat. Dengan demikian istilah nasional itu tidak hanya mencakup pengertian bangsa atau suatu wilayah semata-mata, tetapi lebih menunjukkan makna sebagai "kesatuan dan persatuan kepentingan bangsa yang telah menegara". Perihal tahan (kuat), keteguhan hati, ketabahan dari kesatuan dalam memperjuangkan kepentingan nasional suatu bangsa yang telah menegara.

2. Pengertian Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar Tujuan Nasionalnya.

Kondisi atau keadaan selalu berkembang serta bahaya dan tantangan-tantangan selalu berubah, maka Ketahanan Nasional itu juga harus dikembangkan dan dibina agar memadai dengan perkembangan keadaan. Jadi Ketahanan Nasional adalah dinamik bukan statis.

Ketahanan Nasional adalah tingkat keadaan keuletan dan ketangguhan bangsa dalam menghimpun dan mengerahkan keseluruhan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ada sehingga merupakan kekuatan nasional yang mampu dan sanggup menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan maupun kepribadian bangsa dalam mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya.

Sebagai acuan untuk pemahaman, ada beberapa istilah dalam Ketahanan Nasional sebagai berikut:

Ketangguhan

Kekuatan yang menyebabkan seseorang atau sesuatu dapat bertahan kuat menderita atau kuat menanggulangi beban.

Keuletan

Usaha terus menerus secara giat dengan kemauan yang keras di dalam menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-cita.

Identitas

Ciri khas suatu negara dilihat secara keseluruhan (*holistic*), yaitu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan, dan tujuan nasionalnya serta peranan yang dimainkannya di dalam dunia internasional.

Integritas

Kesatuan yang menyeluruh di dalam kehidupan nasional suatu bangsa, baik sosial, alamiah, potensi fungsional. Dari telaahan dokumen dapat disimak mengenai tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, (GBHN 1973, 1978 dan 1983), dinyatakan bahwa hambatan-hambatan, tantangan-tantangan, ancaman-ancaman, dan gangguan-gangguan yang timbul baik dan luar maupun dan dalam perlu secara efektif dielakkan untuk tetap memungkinkan berjalannya Pembangunan Nasional menuju ke tujuan yang ingin dicapai, dan untuk itu harus secara terus menerus memupuk ketahanan nasional.

Di lingkungan Lemhanas sejak lama dikembangkan pengertian tersebut dengan maksud untuk lebih menjernihkan serta membedakan makna dari keempat istilah tersebut. Pengertian itu dapat dipakai dalam mendalami konsep

Ketahanan Nasional. Di bawah ini dikemukakan pengertiannya masing-masing sebagai berikut:

Ancaman

Merupakan hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijakan dan dilakukan secara konsepsional, kriminal serta politik.

Tantangan

Merupakan hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan.

Hambatan

Merupakan hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.

Gangguan

Merupakan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalang-halangi secara tidak konsepsional.

3. Hakikat Ketahanan Nasional

Pada hakikatnya suatu bangsa dalam suatu negara tidak ada yang bebas dari gangguan yang dapat mengancam eksistensinya sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tiap bangsa membedakannya dalam membina kewaspadaannya.

Ketahanan Nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia dapat meliputi sebagai berikut:

- a. Ketahanan Nasional bidang ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung

- kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa;
- b. Ketahanan Nasional bidang politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif;
 - c. Ketahanan Nasional bidang ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur;
 - d. Ketahanan Nasional bidang sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang menjiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta Tanah Air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional;

- e. Ketahanan Nasional bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

4. Ciri dan Asas Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sehingga berbagai ciri ketahanan nasional yang dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan bangsa Indonesia.

a. Ciri Ketahanan Nasional

- 1) Ketahanan Nasional merupakan prasyarat bagi bangsa yang sedang membangun dirinya menuju bangsa yang maju dan mandiri. Ketahanan Nasional dijadikan prasyarat utama bagi bangsa yang maju dan mandiri. Ketahanan Nasional dijadikan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun karena semangat tidak mengenal menyerah akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan, dan gangguan yang timbul.
- 2) Menuju dan mempertahankan kelangsungan hidup. Bagi bangsa yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan sebagaimana dicita-citakan. Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea pertama, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah

- hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan".
- 3) Ketahanan Nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan. Menjadikan ciri dalam mengembangkan ketahanan nasional harus berdasarkan pada hal-hal berikut ini:
- a) Rasa cinta tanah air;
 - b) Setia kepada perjuangan;
 - c) Ulet dalam usaha yang didasarkan pada:
 - ✓ Ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - ✓ Keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - d) Didasarkan pada Astagatra. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara geografis berada di posisi silang dunia, pengembangan ketahanan nasional didasarkan baik pada kondisi alamiah maupun kondisi sosial, sesuai dengan perkembangan dan situasi yang dihadapi bangsa.
 - e) Dijiwai wawasan nasional. Dilandasi semangat integralistik, bangsa Indonesia mengembangkan diri atas dasar:
 - ✓ Nasionalisme Indonesia;
 - ✓ Pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju

- dan mandiri;
 - ✓ Pembangunan yang berwawasan teknologi berwajah manusiawi;
 - ✓ Berperan dalam ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
- f) Pola umum operatif didasarkan Pancasila dan UUD 1945. Gerakan pembangunan nasional merupakan keseluruhan semangat yang diarahkan dalam rangka pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, pembangunan nasional yang berwawasan nasional (kebangsaan) merupakan rangkaian upaya bangsa yang berkesinambungan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bumi Nusantara.

b. A s a s

Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia didasari pada asas, sebagai berikut:

1) Kesejahteraan dan keamanan

Penyelenggaraan ketahanan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat pada setiap saat dalam kehidupan nasional sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi.

2) Utuh Menyeluruh Terpadu

Ketahanan Nasional mencakup kehidupan bangsa secara menyeluruh dari seluruh kehidupan bangsa dalam wujud persatuan dan kesatuan, perpaduan yang

selaras, serasi dan seimbang dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

3) *Keluargaan*

Sikap kekeluargaan mengandung kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4) *Mawas Diri*

Dalam interaksi hubungan dengan lingkungan baik ke dalam maupun ke luar, bangsa Indonesia harus mampu bermawas diri. Pengaruh hubungan interaksi itu akan memberikan dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif sehingga diperlukan mawas diri. Khusus dalam rangka arus globalisasi, bangsa Indonesia harus pandai dalam menyesuaikan diri.

E. Rangkuman

Membangun karakter bangsa merupakan suatu proses untuk membina, memperbaiki dan membentuk tabiat, watak insan manusia sehingga menunjukkan perbuatan, perilaku yang baik dan positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karakter bangsa sebagaimana diharapkan dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain: adanya saling menghargai dan menghormati, adanya rasa kebersamaan dan tolong menolong, adanya rasa persatuan dan kesatuan dan adanya moral dan akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai agama.

Untuk memelihara kelangsungan karakter bangsa sebagaimana diharapkan tersebut, maka faktor-faktor yang senantiasa perlu diperhatikan antara lain:

Faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan kepemimpinan.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur dari suatu bangsa, tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan.

Oleh karena itu, setiap bangsa dituntut harus mempunyai kemampuan, kekuatan, ketangguhan dan keuletan untuk mengatasinya sehingga bangsa tersebut senantiasa tetap tahan dan kuat untuk menghadapinya dan dengan demikian bangsa tersebut dapat mempertahankan kehidupan dan kelangsungan cita-citanya. Ketahanan Nasional dimaksud, pada hakikatnya meliputi: bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan.

Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia nilai kejuangan dimaksudkan untuk menggambarkan daya pendorong, pelawan dan pendobrak yang mampu membawa bangsa ini untuk membebaskan dirinya dari penjajahan dan bebas merdeka.

Berkat pengalaman sejarah perjuangan bangsa dalam mengusir penjajah dan mengemban amanat penderitaan rakyat akhirnya mampu melandasi timbulnya semangat untuk menjadi bangsa yang bersatu, mempunyai semangat pengabdian, pengorbanan, sikap perkasa, gagah berani, rela berkorban karena ada

kesadaran dan rasa tanggung jawab membela kebenaran, keadilan dan kejujuran demi kebaktian terhadap nusa dan bangsa yang tercinta.

F. Evaluasi

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini secara jelas dan ringkas dengan mengacu pada butir-butir yang telah diajarkan.

1. Apakah yang dimaksud dengan nilai kejuangan itu?
2. Untuk maksud apa nilai kejuangan itu dikaitkan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
3. Apakah hakikat mempelajari perjuangan bangsa?
4. Sebutkan nilai-nilai prinsip yang diwariskan dalam perjuangan bangsa!
5. Jelaskan mengenai pengertian membangun karakter (*Character Building*) dan apa yang anda ketahui mengenai ciri-ciri suatu bangsa yang mempunyai karakter.
6. Faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan untuk membangun karakter dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Jelaskan menurut pengetahuan anda yang berkenaan dengan Ketahanan Nasional.

BAB V SOSIAL BUDAYA DAN WAWASAN KEBANGSAAN SEBAGAI KEKUATAN NASIONAL

A. Pengertian Sosial Budaya

Istilah sosial budaya menunjuk kepada dua segi kehidupan bersama manusia, yaitu segi kemasyarakatan dan segi kebudayaan.

1. Kemasyarakatan

Dalam usahanya beradaptasi dengan lingkungannya, manusia bekerjasama dengan sesamanya, dengan kata lain bermasyarakat. Akan tetapi kerja sama itu hanya akan berjalan baik di dalam tertib sosial budaya serta di dalam wadah organisasi sosial. Organisasi sosial ini merupakan produk sosial budaya, sekaligus merupakan wadah perwujudan dan pertumbuhan kebudayaan.

Di dalam organisasi sosial manusia hidup berkelompok dan mengembangkan norma sosial yang meliputi kehidupan normatif, status, kelompok asosiasi, dan institusi. Organisasi sosial juga mencakup aspek fungsi yang mewujudkan diri dalam aktifitas bersama anggota masyarakat dan aspek struktur. Aspek struktur terdiri dari struktur kelompok di

dalam pola umum kebudayaan dan seluruh kerangka lembaga sosial.

Setiap masyarakat mempunyai empat unsur penting yang menentukan eksistensinya yaitu struktur sosial, pengawas sosial, media sosial dan standar sosial.

a. Struktur sosial

Setiap masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

b. Pengawas sosial

Pengawas sosial mencakup sistem dari ketentuan-ketentuan yang mengatur kegiatan dan tindakan anggota masyarakat, pengetahuan empiris yang digunakan manusia untuk menanggulangi lingkungan, dan pengetahuan empiris yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia seperti agama, kepercayaan, ideologi, dan sebagainya.

c. Media sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan sosial, diperlukan adanya komunikasi dan relasi antar anggota masyarakat. Komunikasi dan relasi itu dilangsungkan dengan menggunakan bahasa dan alat transportasi.

d. Standar sosial

Standar sosial merupakan ukuran untuk menilai tingkah laku anggota masyarakat serta menilai tingkah cara masyarakat mencapai tujuan.

2. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan cara hidup masyarakat yang perwujudannya tampak pada tingkah laku para anggotanya. Kebudayaan tercipta oleh banyak faktor organ biologis manusia, lingkungan alam, lingkungan sejarah, dan lingkungan psikologinya. Masyarakat budaya membentuk pola budaya sekitar satu atau beberapa fokus budaya. Fokus budaya dapat berupa nilai misalnya keagamaan, ekonomi, ideologi, dan sebagainya.

Setelah dikemukakan masing-masing arti kata dari sosial dan budaya, maka pengertian sosial budaya dapat dirumuskan adalah sebagai kondisi masyarakat (bangsa) yang mempunyai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dilandasi dengan falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketahanan di bidang sosial budaya dimaksud menggambarkan kondisi dinamis suatu, bangsa (masyarakat), berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan pengembangan kekuatan nasional di dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun dari luar yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Dibidang Sosial Budaya

1. Tradisi ini memberikan kepada masyarakat/bangsa seperangkat nilai dan kaidah yang diperlukan untuk menjawab tantangan setiap tahap perkembangan. Tradisi sosial ini pada dasarnya bersifat dinamis, karena itu nilai-nilai serta kaidah-kaidah yang tidak dapat menjawab tantangan, akan lenyap secara wajar. Dalam hal ini perlu dihindari ialah tradisionalisme, yaitu sikap atau pandangan menuju dan mempertahankan “peninggalan masa lampau secara berlebihan dan tidak wajar”. Masyarakat harus dapat menilai dan menyadari bahwa suatu tradisi tertentu pada suatu tahap perkembangan mungkin tidak sejalan sehingga merugikan dan menghambat kemajuan.
2. Pendidikan
Pendidikan merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap ketahanan di bidang sosial budaya. Melalui pendidikan masyarakat akan memperoleh kemampuan untuk menilai tradisi yang sudah tidak sesuai lagi. Pendidikan bersifat mengubah secara tertib ke arah tujuan yang dikehendaki. Pendidikan dalam arti luas ialah usaha untuk mendewasakan manusia agar dapat mengembangkan potensinya serta berperan serta secara penuh dalam menumbuhkan kehidupan sosial sesuai dengan tuntutan jaman. Untuk itu diperlukan adanya suatu sistem pendidikan yang kondusif sehingga mampu membawa masyarakat ke arah pencapaian tujuannya.

Sistem pendidikan mempunyai berbagai sarana diantaranya yang penting adalah:

- a. Seluruh aparatatur pemerintahan modern;
- b. Sarana komunikasi massa;
- c. Pendidikan formal dan non formal;
- d. Sarana massa;
- e. Kehidupan kota.

Didalam masyarakat berkembang inisiatif pemerintah dan potensi yang ada padanya merupakan yang paling kuat dan mampu menggerakkan pendidikan secara luas. Pemerintah harus mampu mengatur pendidikan formal berencana dengan memanfaatkan segenap sistem komunikasi yang tersedia dan adanya kata merangsang harapan baru serta keinginan berkompetensi untuk kemajuan.

3. Kepemimpinan dan Penyelenggara Negara
Untuk membina dan membangun masyarakat modern, diperlukan kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa. Kepemimpinan yang demikian ditentukan oleh banyak faktor, yaitu pribadi (moral, akhlak, semangat, dan akuntabilitas) pemimpin, komitmen pimpinan, tujuan nasional, nilai-nilai sosial budaya, keadaan sosial atau masyarakat, sistem politik, dan ilmu pengetahuan.
4. Tujuan Nasional
Tujuan nasional dapat merupakan unsur pengarah, pemersatu, pemberi motivasi, dan merupakan salah satu identitas nasional. Tujuan nasional selalu berintikan falsafah negara.
5. Kepribadian Nasional
Kepribadian nasional merupakan hasil perkembangan sejarah

dan cita-cita bangsa yang dirumuskan sebagai dasar kehidupan bangsa. Kepribadian ini perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada setiap generasi karena kepribadian nasional inilah merupakan daya tangkal yang sangat strategis untuk menghadapi tantangan pengaruh asing.

6. Bidang Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan Keamanan adalah upaya rakyat semesta dengan TNI dan POLRI sebagai intinya. Merupakan salah satu fungsi pemerintahan dalam menegakkan Ketahanan Nasional dengan tujuan mencapai keamanan bangsa dan negara serta keamanan hasil perjuangannya. Pelaksanaannya dilakukan dengan menyusun, mengerahkan, serta menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan masyarakat dalam semua bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi.

a. Ketahanan Nasional di bidang pertahanan keamanan dapat diartikan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kekuatan nasional untuk mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, serta tantangan yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan pertahanan keamanan negara.

b. Faktor yang mempengaruhi ketahanan di Bidang Pertahanan Keamanan (Hankam).

Faktor yang mempengaruhi ketahanan dibidang Hankam ialah: wawasan nasional, sistem Hankam, geografi, integrasi angkatan bersenjata dan rakyat, pendidikan kewiraan, material, ilmu pengetahuan dan teknologi, manajemen, pengaruh luar negeri dan kepemimpinan.

1) Pertahanan dan Keamanan yang tangguh diperlukan untuk menanggulangi:

- a) Masalah pertahanan terhadap invasi dari luar;
- b) Masalah pemeliharaan keamanan dalam negeri;
- c) Masalah akibat pasca perang dingin (perang urat syaraf, subversi, infiltrasi, spionase, dan ekonomi); dan terorisme;
- d) Masalah perwujudan dan pemeliharaan kestabilan serta keamanan wilayah;
- e) Masalah Hankam dan sosial politik.

2) Wawasan Nasional

Wawasan yang dianut dalam doktrin Hankam ialah wawasan nasional yang berintikan kekompakan, kesatuan, serta keterpaduan antara pemerintah, angkatan bersenjata, dan rakyat.

3) Kondisi Geografis Negara

Untuk dapat mempertahankan negara sesuai dengan keadaan geografisnya, diperlukan kekuatan Hankam yang disegani yang sekurang-kurangnya merupakan faktor pencegah (*deterent factor*).

4) Manusia

Dalam banyak hal manusia merupakan faktor penentu. Upaya Hankam menuntut juga yang memiliki sikap mental positif yang terwujud sebagai moral yang tinggi, kepercayaan diri, nasionalisme/patriotisme dan jiwa korps yang kuat.

5) Integrasi TNI dan POLRI dengan rakyat.

Ketahanan Nasional khususnya di bidang pertahanan keamanan, merupakan usaha terpadu/terintegrasi antara TNI dan POLRI dengan rakyat secara keseluruhan. Oleh karena itu integrasi antara angkatan bersenjata merupakan syarat mutlak. Sifat hubungan antara kedua unsur itu ditentukan oleh falsafah negara sebagai landasan cita-cita nasional. Integrasi di dalam angkatan bersenjata sendiri juga merupakan keharusan, karena perang modern bersifat semesta serta mempunyai daya pemusnah yang sangat besar akibat digunakannya senjata teknologi mutakhir.

6) Pendidikan Bela Negara

Pertahanan Keamanan diproyeksikan maksimal kepada perang rakyat semesta. Oleh karena itu diperlukan pendidikan bela negara untuk menanamkan kesadaran Hankamnas melalui pendidikan nasional. Pendidikan bela negara juga merupakan sarana untuk menumbuhkan keselarasan dan kemampuan berpikir, bersikap, serta bertata laku secara komprehensif integrasi dalam rangka upaya nasional.

7) Material

Perindustrian pertahanan di negara berkembang masih berada pada taraf permulaan. Sehubungan dengan hal tersebut masih diperlukan peningkatan kerja sama dan penyesuaian antar angkatan, serta antar industri pertahanan dan industri sipil. Karena itu di dalam peralatan negara berkembang masih banyak tergantung kepada luar negeri.

8) Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pada umumnya negara-negara berkembang masih sangat ketinggalan. Untuk mengejar ketinggalan tersebut dipikirkan pemanfaatan teknologi madya

9) Manajemen

Kemampuan manajemen di semua eselon perlu ditingkatkan, terutama di bidang koordinasi, integrasi, penyesuaian dan penyederhanaan. Lebih-lebih dengan anggaran yang terbatas, bidang pertahanan memerlukan tingkat manajemen yang tinggi sehubungan dengan manusia, material, keuangan dan sebagainya.

10) Pengaruh Luar Negeri

Sesuai dengan hubungan antar negara besar, tampak suatu pola umum bahwa ketegangan dunia dewasa ini beralih ke wilayah negara-negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh kondisi dan situasi negara berkembang yang sangat rawan, sehingga mudah diganggu, dihambat, atau dicampuri oleh kekuatan luar. Dalam kondisi dan situasi demikian, negara-negara besar berusaha mencari daerah pengaruhnya masing-masing.

Keadaan di atas merupakan tantangan bagi bangsa-bangsa berkembang. Untuk menjawabnya mereka harus meningkatkan Ketahanan Nasional umumnya dan Ketahanan di bidang Hankam khususnya. Lain dari pada itu, mereka perlu mengadakan kerjasama antar bangsa, sehingga dapat diciptakan Ketahanan

Nasional yang cukup mantap.

11) Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat dan berwibawa terutama diperlukan dalam keadaan darurat agar dapat menjamin kelangsungan kehidupan nasional yang merdeka dan berdaulat.

c. Sifat-sifat Ketahanan Nasional.

1) Ketahanan Nasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

a) Manunggal

Ketahanan Nasional bersifat manunggal, dalam arti terdapat integrasi yang serasi dan selaras antara trigatra dan pancagatra.

b) Mawas ke dalam

Ketahanan Nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara sendiri, karena bertujuan mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya sendiri. Sifat mawas ke dalam ini tidak sama dengan sifat isolasi (memisahkan diri) atau nasionalisme sempit. Sifat mawas ke dalam dan hubungan internasional yang terpelihara baik, memberikan dampak positif terhadap Ketahanan Nasional.

c) Berkewibawaan

Pandangan yang bersifat manunggal menghasilkan kewibawaan nasional yang harus diperhitungkan oleh pihak lain serta mempunyai daya pencegah. Makin tinggi kewibawaan, makin besar daya pencegah itu.

d) Dinamis

Ketahanan Nasional suatu bangsa tidak tetap keberadaannya. Ia meningkat atau menurun sesuai dengan kondisi dan situasi bangsa itu sendiri.

e) Tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan kekuasaan.

Konsep Ketahanan Nasional dapat dipandang sebagai alternatif di samping konsepsi politik kekuatan yang mengutamakan adu kekuatan dan kekuasaan yang masih dianut oleh negara-negara maju pada umumnya. Berbeda dengan politik kekuatan yang bertumpu pada kekuatan fisik saja, melainkan juga memanfaatkan kekuatan lainnya, misalnya kekuatan moral yang dimiliki suatu bangsa. Sesuai dengan sifat tersebut, Ketahanan Nasional mementingkan musyawarah dan sikap saling menghargai di dalam pergaulan hidup manusia, serta menghindari permusuhan dan konfrontasi.

f) Percaya kepada diri sendiri (*Self Confidence*)

Ketahanan Nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap percaya diri. Bangsa yang merdeka dan berdaulat harus yakin bahwa ia dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, dan tidak tergantung kepada bantuan luar. Jika diperlukan, maka bantuan itu hanya bersifat melengkapi (komplementer).

g) Tidak bergantung kepada pihak lain (*Self Reliance*)

Pada umumnya negara berkembang merupakan

bekas daerah jajahan dan masih dipengaruhi oleh mental kolonial dan masih merasa bergantung kepada bekas penjajahnya. Sikap mental seperti ini harus secara sadar dikikis habis. Sebagai gantinya harus ditumbuhkan sikap percaya kepada diri sendiri, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air yang sehat dan rasional.

C. Manfaat Sosial Budaya Sebagai Kekuatan Bangsa

Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. Bangsa yang besar tercermin dalam budayanya. Peperangan tidak hanya ditentukan oleh persenjataan yang serba modern tetapi justru sangat banyak ditentukan oleh persatuan dan kesatuan bangsa.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa kondisi dinamis suatu bangsa, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung berbagai kemampuan-kemampuan dan nilai-nilai sosial budaya sebagai suatu bangsa adalah menjadi kekuatan nasional di dalam setiap menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik dari dalam maupun dari luar, secara langsung atau juga tidak secara langsung yang dapat membahayakan pertahanan keamanan bangsa dan negara.

Sebagaimana diketahui bahwa sosial budaya yang tumbuh dan berkembang sangat beraneka ragam seiring dengan tempat (wilayah/daerah), etnis dan suku daerah yang bersangkutan.

Namun keanekaragaman tersebut justru dapat sebagai perekat bangsa dan bahkan menjadi kekuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa kedudukan atau keberadaan sosial budaya dapat berperan demikian, oleh karena nilai-nilai sosial budaya tersebut mengandung nilai antara lain adalah:

1. Adanya nilai kebersamaan dalam rangka mencapai tujuan;
2. Adanya nilai yang berperan sebagai aturan, ketentuan yang telah membudaya dalam kehidupan kelompok-kelompok masyarakat dan hal ini dijadikan acuan bagi anggota masyarakat dalam rangka berbuat (sikap dan tingkah laku);
3. Hubungan kemasyarakatan yang saling menghormati dan menghargai dalam kelompok-kelompok sosial, hal ini dijadikan sebagai instrumen sosial dalam rangka pelaksanaan tugas dan kegiatan-kegiatan sosial;
4. Adanya standar yang dijadikan sebagai tolok ukur dalam rangka menilai sikap dan tingkah laku serta cara masyarakat mencapai tujuan;
5. Adanya rasa solider antar sesama, artinya mengakui, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban serta hak asasi manusia dalam berbagai hal/aspek (suku, keturunan, agama, dan kepercayaan, kedudukan sosial dan sebagainya);
6. Nilai persatuan dan kesatuan sebagai suatu bangsa;
7. Nilai kesetiaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nilai-nilai sosial budaya tersebut merupakan dasar kekuatan untuk menyemangati operasional manakala ada ancaman,

tantangan, hambatan dan gangguan terhadap ketahanan nasional atau dapat dikatakan bahwa sosial budaya yang tangguh dan ampuh adalah merupakan kekuatan bangsa untuk menangkal setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dari dalam. Mengingat keberadaan sosial budaya sebagai kekuatan dan aset bangsa, maka pembangunan sosial budaya merupakan kunci sangat strategis dalam pembangunan nasional.

D. Wawasan Kebangsaan Sebagai Kekuatan Nasional

1. U m u m

Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Para pejuang bangsa kita (*the founding fathers*) yang telah melahirkan dan membentuk negara ini dengan pemikiran yang arif dan bijaksana, dan dengan pandangan yang jauh ke depan telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dan teguh di atas nama negara ini dapat tumbuh dan berkembang dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu prinsip dasar yang diletakkan adalah prinsip negara kesatuan yang bersifat integralistik dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi pemikiran dari para pembentuk negara (*the founding fathers*) pada waktu itu adalah bahwa negara yang akan dikelola nanti, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, yang terdiri dari

berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat dan sebagainya. Kondisi obyektif seperti itu pada satu sisi mengandung kekuatan tetapi pada sisi yang lain sekaligus mengandung kelemahan.

Ia mengandung kekuatan apabila perbedaan-perbedaan dari keanekaragaman itu dapat hidup bersama dalam satu kesatuan yang harmonis. Sebaliknya ia mengandung kelemahan, apabila perbedaan-perbedaan yang ada dalam keanekaragaman itu hidup dalam suasana penuh kecurigaan, pertentangan dan bahkan saling menghancurkan antar satu dengan yang lainnya. Itu sebabnya, sistem kenegaraan dan sistem pemerintahan yang ingin dikembangkan adalah sistem pemerintahan yang bersifat demokratis dan desentralistik dalam negara kesatuan yang utuh dan menyeluruh. Dengan prinsip negara kesatuan memang menghendaki adanya pemerintahan pusat yang kuat dan berwibawa untuk menjamin terpeliharanya stabilitas nasional dan kesatuan bangsa sedangkan prinsip desentralisasi menghendaki adanya pemerintahan daerah yang semakin dewasa, mandiri, dan demokratis.

Dengan demikian harmonisasi hubungan pusat dan daerah menurut adanya wawasan kebangsaan yang memahami keberadaan wawasan kewilayahan/kedaerahan yang memiliki karakteristik tertentu untuk dikembangkan dengan penuh prakarsa, kreasi, dewasa, dan mandiri. Demikian juga sebaliknya, wawasan kewilayahan/kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri hendaknya senantiasa ditempatkan

secara proporsional untuk memperkuat pembinaan wawasan kebangsaan.

Wawasan kebangsaan yang di dalamnya memberikan ruang dan kesempatan untuk berkembangnya wawasan kewilayahan/kedaerahan yang semakin dewasa dan mandiri itu pada hakikatnya bertolak dari fakta bahwa memang wilayah negara ini sangat luas, yang di dalamnya hidup masyarakat bangsa yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Keanekaragaman itu justru dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempersatukan dan membangun bangsa yang besar itu.

Paham kebangsaan atau nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas tertinggi terhadap masalah duniawi (*sumpreme secular loyalty*) dari setiap warga bangsa ditujukan kepada negara dan bangsa. Paham kebangsaan merupakan paham modern yang lahir pada akhir abad XVIII atau permulaan abad XIX. Sepanjang sejarah manusia, dengan dimulainya gelombang kehidupan pertama manusia (*first wave*) menurut Alvin Toffler, manusia memang telah terikat pada tanah tempat mereka tinggal, pada tradisi orang tuanya, adat istiadat masyarakat lingkungannya; namun baru pada akhir abad XVIII paham kebangsaan menampakkan diri sebagai paham yang sangat menentukan bagi gerakan sejarah modern umat manusia. Orang biasa menyebut-nyebut bahwa revolusi Amerika dan revolusi Perancislah sebagai titik awal lahirnya paham kebangsaan ini. Sejak itu paham kebangsaan laksana air bah yang tak dapat dibendung lagi yang

menjangkau penyebarannya ke seluruh pelosok dunia. Abad XIX sering disebut sebagai abad kebangsaan di Eropa, sedangkan abad XX merupakan abad kebangkitan nasional bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Maka tidak mengherankan apabila wadah nasionalisme itu juga menyentuh bangsa Indonesia pada permulaan abad 20 ini. Pada tahun 1908 pemuda Soetomo dan Tjipto Mangoenkoesoemo mendirikan organisasi Boedi Oetomo sebagai *cornerstone* kebangkitan nasional bangsa Indonesia.

Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme atau paham kebangsaan ini diwarnai oleh slogan yang sangat terkenal "*liberty, equality, fraternity*" yang merupakan pangkal tolak nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya masing masing, sehingga memberikan ciri khas atau jati diri bagi masing-masing bangsa.

Untuk dapat memahami jati diri suatu bangsa perlu dipahami pandangan hidup dan falsafah hidup yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, jati dirinya dapat dikenali dalam berbagai rumusan yang merupakan kesepakatan nasional seperti:

- a. Bangsa Indonesia mengakui dan meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional adalah rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kesadaran serta keteguhan bangsa Indonesia pada falsafah Pancasila;
- b. Pancasila menjadi landasan idiil pembangunan nasional;

- c. Keseluruhan semangat, arah dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengamalan Pancasila;
- d. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945.

Oleh karena itu untuk dapat memahami bagaimana wawasan kebangsaan bagi bangsa Indonesia, perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila, yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa.

2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan kesatuan bangsa memiliki 6 (enam) dimensi manusia yang bersifat mendasar dan fundamental, yaitu:

- a. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
- b. Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu;
- c. Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
- d. Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
- e. Kesetiakawanan sosial;
- f. Masyarakat adil makmur.

Secara fundamen wawasan kehidupan religius diwujudkan dengan memeluk agama dan menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi oleh negara, dan

sewajarnya mewarnai hidup kebangsaan. Wawasan Kebangsaan membentuk manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya sebagai obyek dan subyek usaha pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia menunjukkan, bahwa Wawasan Kebangsaan menengahkan manusia ke dalam pusat hidup bangsa. Hal ini berarti bahwa dalam persatuan dan kesatuan bangsa masing-masing pribadi harus dihormati.

Bahkan lebih dari itu wawasan kebangsaan menegaskan, bahwa manusia seutuhnya adalah pribadi, subyek dari semua usaha pembangunan bangsa. Semua usaha pembangunan dalam segala bidang kehidupan berbangsa bertujuan agar masing-masing pribadi warga bangsa dapat menjalankan hidupnya secara bertanggungjawab demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, maju dan mandiri akan berhasil dengan kesatuan dan persatuan bangsa yang kukuh dan berjaya.

"Cinta akan Tanah Air dan Bangsa" menegaskan nilai sosial dasar.

Dengan ini Wawasan Kebangsaan menempatkan penghargaan tinggi akan kebersamaan yang luas, yang melindungi masing-masing warga dan menyediakan tempat untuk perkembangan pribadi bagi setiap warga. Tetapi sekaligus mengungkapkan hormat terhadap solidaritas manusia. Solidaritas itu mengakui hak dan kewajiban asasi

sesamanya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

Paham kebangsaan dapat berwawasan luas dapat berwawasan sempit, Fasisme, Naziisme sebagai Nasionalisme sebagai suatu tekad bersama yang tumbuh dari bawah untuk bersedia hidup sebagai suatu bangsa dalam negara merdeka. Kebangsaan/Nasionalisme adalah paham kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Mau tidak mau kebangsaan selalu berkaitan erat dengan demokrasi. Tanpa demokrasi, kebangsaan akan mati bahkan merosot menjadi Fasisme/Naziisme, yang bukan saja berbahaya bagi berbagai minoritas dalam bangsa yang bersangkutan, tetapi juga berbahaya bagi bangsa lain.

Kesetiakawanan sosial sebagai nilai merupakan rumusan lain dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa kesejahteraan rakyat lebih dari hanya kemakmuran yang paling tinggi dari jumlah orang yang paling hebat. Kesejahteraan rakyat lebih dari keseimbangan antara kewajiban sosial dan keuntungan individu. Kesejahteraan sosial boleh disebut kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum itu mencakup keseluruhan lembaga dan usaha dalam hidup sosial, yang membangun dan memungkinkan masing-masing pribadi, keluarga dan kelompok sosial lain untuk mencapai kesempurnaan mereka secara lebih penuh dan dengan lebih mudah.

Kebangsaan dan demokrasi bukanlah tujuan, tetapi merupakan sarana dan wahana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu ciri khas dari negara demokrasi yang membedakannya dari negara yang totaliter adalah toleransi. Wawasan Kebangsaan menegaskan, bahwa demokrasi kita tidak sama dengan kemenangan mayoritas atau minoritas. Karena itu dalam demokrasi kita segala sesuatu dapat diputuskan dengan cara musyawarah dan tidak mengutamakan pengambilan putusan dengan suara terbanyak (*voting*). Hal yang sama nampak dalam kerukunan hidup beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Ada sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya.

3. Manfaat/Makna Wawasan Kebangsaan

Wawasan Kebangsaan ini mengutamakan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Diharapkan manusia Indonesia sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Sehubungan dengan itu hendaknya dipupuk penghargaan terhadap martabat manusia, cinta kepada Tanah Air dan bangsa, demokrasi dan kesetiakawanan sosial.

Wawasan Kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa sehingga asas *Bhinneka Tunggal Ika* dipertahankan. Persatuan tidak boleh mematikan keaneka dan

kemajemukan. Sebaliknya keanekaan dan kemajemukan tidak boleh menjadi pemecah belah tetapi menjadi hal yang memperkaya persatuan.

Wawasan Kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang picik. Yang diamanatkan ialah agar para warga membina dengan jiwa besar dengan setia cinta akan Tanah Air, tetapi tanpa kepicikan jiwa. Cinta Tanah Air dan Bangsa selalu sekaligus diarahkan pada kepentingan seluruh umat manusia yang saling berhubungan dengan berbagai jaringan antar ras, antar bangsa, dan antar negara.

Mencermati makna wawasan kebangsaan tersebut dapatlah dikemukakan bahwa Wawasan Kebangsaan Indonesia pada hakikatnya dilandasi oleh Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa kita.

Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya ditengah tengah tata kehidupan di dunia.

E. Rangkuman

Sosial budaya dan wawasan kebangsaan senantiasa dibina dan dipelihara sehingga merupakan alat untuk memelihara persatuan dan kesatuan, kebersamaan, saling menghargai serta tidak ada merasa ingin menang sendiri, merasa ingin menonjolkan diri dan lain sebagainya.

Dalam hubungan sosial budaya dan wawasan kebangsaan dimaksud haruslah ditempuh melalui Rekayasa Sosial dan jangan dibiarkan menentukan arahnya sendiri. Proses pembinaannya haruslah ditumbuhkembangkan dari nilai-nilai sosial budaya bangsa itu sendiri dan nilai-nilai moralitas Pancasila yang diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan jaman. Proses Pembinaan dimaksud dilaksanakan melalui pembangunan sosial budaya baik secara kedaerahan maupun secara nasional yang senantiasa berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dengan orientasi perwujudan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

F. Evaluasi

Jawablah soal-soal latihan di bawah ini secara jelas dan ringkas dengan mengacu pada butir-butir yang telah diajarkan.

1. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan dibidang sosial budaya?
2. Mengapa dikatakan Sosial Budaya sebagai kekuatan bangsa, sebutkan dan jelaskan!
3. Jelaskan manfaat Wawasan Kebangsaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Lembaga Informasi Nasional.
2. Lembaga Pengkajian Strategi dan Pembangunan & PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta, 1994 "Pendidikan Wawasan Kebangsaan", Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendekiawan Indonesia.
3. Dimensi Rohani dan Wawasan Kebangsaan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bintoro Tjokroamidjojo, 1996.
4. Bahan Penataran dan Prajabatan Golongan III yang mengenai:
 - a. Wawasan Kebangsaan dan Kebangkitan Nasional;
 - b. Wawasan Nusantara;
 - c. Nilai-nilai Kejuangan;
 - d. Ketahanan Nasional Indonesia.
5. Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Moerdiono, 1991, yang berkenaan Integritas Nasional.
6. Sistem Pemerintahan Indonesia, Kansil, 1987.
7. Dasar-dasar Ilmu Tatanegara, Budiyanto, 1997.
8. Ilmu Politik dan Perspektifnya, Hari Cahyoyo, 1986.
9. Cinta Negara Persatuan Indonesia, Disunting oleh Soeprapto Saafroedin Bahar Ismail Arianto, BP & Pusat, 1995.
10. Pancasila Sebagai Ideologi, Disunting oleh: Oetojo Oesman dan Alfian, BP-7 Pusat, 1993.